

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH DI SDN INPRES
BAMBAMANURUNG KECAMATAN TOPOYO
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**



Oleh :

SUKMA RAHMAWATY

Nomor Induk Mahasiswa : 105611100319

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2023

SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA BANTUAN OPERASIONAL

SEKOLAH DI SD INP BAMBAMANURUNG KECAMATAN

TOPOYO KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Administrasi Negara (S.AP)

Disusun dan Diajukan Oleh:

SUKMA RAHMAWATY

Nomor Induk Mahasiswa: 105611100319

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2023

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

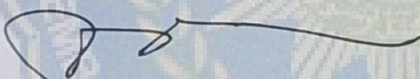
Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Dana Bantuan
Operasional Sekolah Di SDN Inpres
Bambamanurung Kecamatan Topoyo Kabupaten
Mamuju Tengah

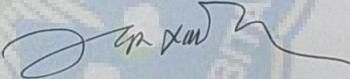
Nama Mahasiswa : Sukma Rahmawaty
Nomor Induk Mahasiswa : 105611100319
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

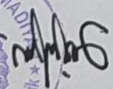

Prof. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si

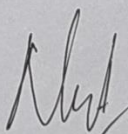

Dr. Haerana, S.Sos., M.Pd

Mengetahui:

Dekan

Ketua Program Studi


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM : 730727


Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si
NBM : 991742

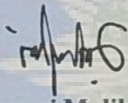
HALAMAN PENERIMAAN TIM

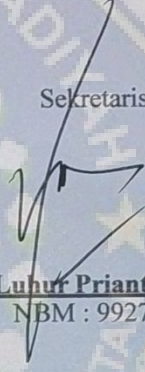
Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0174/FSP/A.4-II/VIII/45/2023 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Selasa 15 Agustus 2023.

Mengetahui :


Ketua


Sekretaris

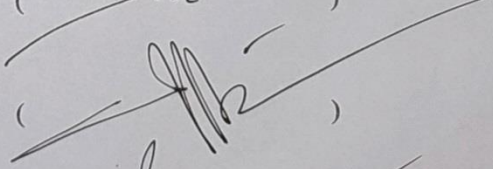

Dr. Hj. Ihvani Malik, S.Sos., M.Si
NBM : 730727



Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si
NBM : 992797

Tim Penguji :

1. Prof. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si ()

2. Drs. Muhammad Yusuf, S.Sos., M.S ()

3. Dr. Hafis Elfiansyah P., M.Si ()

4. Syukri, S. Sos., M.Si ()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Sukma Rahmawaty

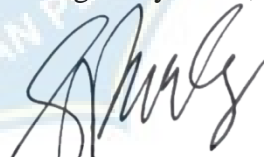
Nomor Induk Mahasiswa : 105611100319

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar Skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 15 Agustus 2023

Yang Menyatakan,



Sukma Rahmawaty

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Tidak ada kata yang paling indah lantunan Al-Qur'an dan As-Sunnah

**“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada KEMUDAHAN.
Sesungguhnya bersama kesulitan ada itu ada KEMUDAHAN”**

(Qs. Al-Insyirah:5-6)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan kesanggupannya”

“Libatkan Allah dalam setiap urusan” (Qs. Al-Baqarah:286)

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda :

“Sesungguhnya dunia dan apa yang ada didalamnya adalah HINA kecuali DZIKIR kepada Allah dan apa-apa yang membawa orang kepada DZIKIR dan orang yang BERILMU dan orang yang BELAJAR”(HR. Tirmidzi)

“Demi massa. Sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang BERIMAN dan mengerjakan KEBAJIKAN serta saling MENASEHATI untuk KEBENARAN dan saling menasehati untuk KESABARAN.” (Qs. Al-‘Asr : 1-3)

ABSTRAK

Sukma Rahmawaty, Muhlis Madani, Haerana Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SD INP Bambamanurung Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah di SD INP Bambamanurung. 1. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi kegiatan. Analisis data yang digunakan teori yang dikemukakan oleh Edward III. Tipe penelitian yang di gunakan adalah tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif penulis bermaksud mendeskripsikan implementasi kebijakan dana BOS SD INP Bambamanurung. Serta apa saja yang menjadi faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan dana BOS di SD INP Bambamanurung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SD INP Bambamanurung Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah dilihat dari faktor komunikasi, sumberdaya, kecenderungan dan struktur birokrasi rata-rata dari hasil wawancara sudah sudah berjalan sesuai dengan juklak dan juknis. Faktor pendorong yaitu semua masyarakat memiliki antusias yang tinggi dalam memilih sekolah gratis dan tidak akan kekurangan siswa, dengan adanya program BOS angka putus sekolah dan tinggal sekolah dapat ditekan, dan faktor penghambat yaitu waktu Pencairan dana BOS tidak tepat waktu, penggunaan Dana BOS terkadang tidak sesuai dengan rencana kegiatan dan skala prioritas kebutuhan sekolah adanya instrument biaya yang tidak terduga yang harus dibeli sekolah yang ditentukan oleh dinas terkait.

Kata Kunci : Dana BOS, Implementasi, Kebijakan, Pemerintah

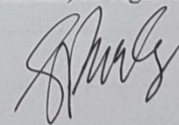
KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SD INP Bambamanurung Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ayahanda Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Nurbiah Tahir, S,Sos,M.Ap selaku sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Bapak Prof. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Haerana,S.Sos., M.Pd selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

6. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang senantiasa membimbing dan mengarahkan saya selama berada di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Terima kasih kepada seluruh Guru dan Staff SD INP Bambamanurung jajarannya yang sangat membantu dalam memberi data sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
8. Kedua orang tua bapak Zain Sumardi dan ibu Asiyah serta saudara kandung Muh Nur Azis Jamsar yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik berupa moril maupun materil.
9. Teman-teman seperjuangan mahasiswa jurusan ilmu administrasi negara terkhusus kelas BC19AN yang senantiasa membantu dan memberikan semangat.
10. Teman-teman yang telah membantu dan memberikan semangat selama pembuatan skripsi. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 15 Agustus 2023

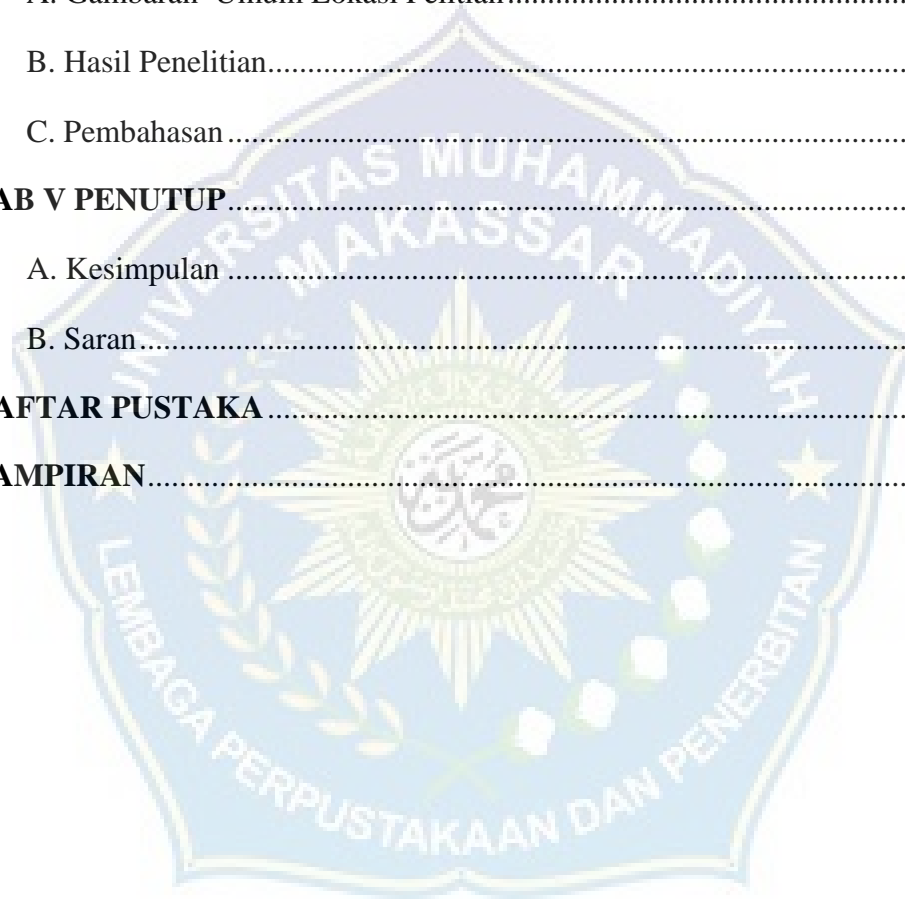


Sukma Rahmawaty

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SEMINAR HASIL	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Teori dan Konsep	10
C. Kerangka Fikir.....	32
E. Deskripsi Fokus	33
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Waktu dan Lokasi	36
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	36

C. Informan Penelitian	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	32
E. Teknik Analisis Data	33
F. Teknik Pengabsahan Data.....	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Lokasi Pelitian.....	42
B. Hasil Penelitian.....	47
C. Pembahasan.....	65
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN.....	77



Daftar Gambar

Gambar 2.1 Bagan Implementasi Kebijakan Edward III	20
Gambar 2.2 Kerangka Pikir	33
Gambar 4.1 Bimtek Sosialisasi BOS Dinas Kabupaten ke Sekolah.....	52
Gambar 4.2 Bimtek Sosialisasi BOS ke Warga Sekolah.....	52



Daftar Tabel

Tabel 2 .1 Penelitian Terdahulu	10
Tabel 2.2 Pembentukan Kebijakan	15
Tabel 3.1 Tabel Informan Penelitian.....	37
Tabel 4.1 Daftar Tabel Pengelola dana BOS di SD INP Bambamanurung	53
Tabel 4.2 Daftar Tabel Sarana dan Prasarana SD INP Bambamanurung	53



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, untuk memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan telah di atur dalam UUD 1945, U U RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. PP No. 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berisikan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 - 5 tahun diwajibkan mengikuti pendidikan dasar.

Dengan penekanan pada wajib belajar sembilan tahun, siswa sekolah dasar dibebaskan dari biaya operasional sekolah. Pihak sekolah secara langsung mengelola biaya operasional sekolah yang meliputi biaya pendaftaran, biaya bulanan, biaya ujian, bahan dan biaya praktek. Biaya tersebut belum termasuk investasi seperti pembelian gedung dan prasarana sekolah, gaji guru dan tenaga kependidikan lainnya, serta biaya terkait peningkatan kualitas guru. Selain itu, dengan menerima dana BOS diharapkan dapat meningkatkan pembelajaran.

Pada tahun 2005 seluruh anak sekolah di Indonesia menerima bantuan dana Sebagai hasil dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari administrasi negara sebagai pemotongan dari subsidi BBM. Jadi sejak tahun 2005 biaya sekolah dibebaskan, SPP (Sumbangan Pengembangan Pendidikan) dan BP3

(Badan Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan) yang dikelola oleh Komite Sekolah Oleh karena itu, setiap orang berhak menerima ketersediaan pendidikan, sehingga pendidikan benar-benar harus tepat sasaran menghasilkan orang-orang yang baik dan kompetitif, juga memiliki karakter dan moral yang baik, tumbuhlah tetap peduli terhadap ketersediaan dan mutu pendidikan bagi masyarakat dari upaya pemerintah untuk meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dapat membangun dan memajukan bangsa dan negara untuk mencapai hal tersebut pengetahuan, kecerdasan dan karakter masyarakat dan pelatihan merupakan investasi yang signifikan dalam implementasi keberlanjutan.

Salah satu indikator penyelesaian program wajib belajar 9 tahun diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP. pada tahun 2005 APK SD mencapai 115% sedangkan SMP pada 2009 tercapai 98,11%, sehingga wajib belajar 9 tahun selesai dalam waktu 7 tahun sebelumnya Education for All (EFA) di Dakar (Permendikbud, 2012).

Program Bantuan Operasional Sekolah dengan tujuan khusus untuk pembebasan biaya dan BOS memastikan siswa miskin tidak putus sekolah karena alasan keuangan, karena dia tidak mampu membeli seragam/dokumen dan pengeluaran lainnya.

Program BOS yang diluncurkan pada bulan Juli 2005 ini memiliki peran tersendiri dalam mempercepat pencapaian wajib belajar 9 tahun. Karena itu, sejak 2009, pemerintah melakukan perubahan Tujuan dari pendekatan dan

orientasi program BOS adalah untuk memperluas akses perbaikan mutu. Mekanisme dana BOS telah berubah Distribusi transfer ke kabupaten/kota 2011 ke transfer provinsi dan kemudian ditransfer secara online ke rekening sekolah tahun 2012. Dana BOS dari rekening Satker Propinsi akan dikirim ke rekening sekolah penerima sesuai BOS. Berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dan penyalur tersebut.

Dana BOS merupakan program pemerintah yang dibuat melalui redistribusi Subsidi BBM di sektor pendidikan. Tujuan dari program ini adalah gratis biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan membantu siswa lain, dan dana BOS dikelola langsung oleh sekolah karena dana BOS ditransfer ke sekolah-sekolah oleh Dinas Pendidikan kabupaten melalui internet. Dengan BOS siswa diharapkan menerima pendidikan Kualitas sampai dengan 9 (sembilan) tahun. Target sasaran dari program ini adalah semua siswa Sekolah Dasar dan Menengah, baik negeri maupun swasta, di seluruh provinsi Indonesia (Annisa, 2020).

Terkait dengan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022 tentang Syarat Penerimaan Dana BOS Reguler, terdapat beberapa syarat dan kriteria yang harus dipenuhi sekolah untuk dapat menerima dana BOS Reguler. Jumlah persyaratan dan kriteria adalah:

1. Memiliki nomor induk sekolah nasional yang tersimpan di Dapodik;

2. Menyelesaikan dan meningkatkan satuan pendidikan Dapodik sesuai dengan kondisi yang sebenarnya paling lambat dari anggaran sebelumnya pada tanggal 31 Agustus
3. Memiliki izin penyelenggaraan pelatihan bagi unit pelatihan yang diselenggarakan oleh badan yang terdaftar di Dapodik
4. Memiliki rekening Satuan Pendidikan atas Nama Satuan Pendidikan
5. Tidak merupakan Satuan Pendidikan kerjasama
6. Tidak ada bagian dari unit pelatihan yang dikelola oleh kementerian/lembaga lain.

Sedangkan unit pelatihan yang diterima Dana Kinerja BOS terdiri dari sekolah mengemudi; dan sekolah lanjutan.

Setelah undang-undang ditetapkan, proses kebijakan berlanjut ke tahap implementasi kebijakan, di mana berbagai individu, organisasi, dan proses bekerja sama untuk melaksanakan arahan kebijakan atau program pemerintah. Implementasi, adalah proses, keluaran, dan hasil fenomena multifaset (Syahrudin, 2019). Pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat dari sudut atau metode tertentu. Metode masalah implementasi adalah salah satunya, menurut Edwards III (1984, pp. 9–10) dengan mengedepankan dua isu utama, yaitu: (i) memasukkan aspek-aspek implementasi yang mendukung kebijakan pendekatan Edwards III menimbulkan masalah implementasi. dan (ii) hambatan implementasi kebijakan menuju keberhasilan berdasarkan dua pertanyaan tersebut, empat fakto wewenang/struktur birokrasi komunikasi, sumber daya, dan disposisi. Dikembangkan sebagai kebutuhan utama bagi

keberhasilan proses implementasi. desain organisasi. Keempat unsur ini merupakan persyaratan penting dalam mempraktekkan suatu kebijakan.

Dalam pelaksanaan kebijakan dana BOS di SDN Inpres Bambamanurung, keterbatasan pemahaman staf dalam mengelola dana menyebabkan keterlambatan pembayaran karena kekurangan tenaga pengajar, sehingga banyak guru yang juga berperan sebagai bendahara sekolah dan pihak sekolah. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui sejauh mana SDN INP Bambamanurung telah melaksanakan pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Pendidikan BOS dengan mengacu pada PP No 57 Tahun 2021 Standar Nasional Pendidikan.

Setiap sekolah umumnya menerapkan kebijakan masing-masing dalam mengelola dana BOS yang diterima dari Dinas Pendidikan Sampang. Karena perbedaan kebijakan tersebut, sekolah saling mempengaruhi untuk memperbaiki proses pendidikan. Pada umumnya dana BOS yang diterima sekolah dikelola dan digunakan untuk peningkatan pendidikan, yang dijabarkan dalam petunjuk teknis dengan bidang peruntukannya. Tetapi terdapat beberapa identifikasi masalah yang kerap terjadi akibat terkait Implementasi dana Bantuan Operasional Sekolah yaitu :

1. Minimnya dana BOS yang diberikan pemerintah sehingga tidak mampu mencukupi kegiatan operasional sekolah.
2. Penggunaan dana BOS belum sepenuhnya dipergunakan untuk kebutuhan siswa.

3. Terjadinya Penyimpangan dana BOS yang dilakukan oleh pihak sekolah
4. Pelaporan penggunaan dana BOS yang kurang transparan terhadap warga sekolah.
5. Penggunaan dana belum digunakan secara efektif dan efisien berdasarkan petunjuk dan teknis penggunaan dana BOS.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana komunikasi dalam implementasi kebijakan dana BOS di SDN INP Bambamanurung Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah ?
2. Bagaimana sumber daya dalam implementasi kebijakan dana BOS di SDN INP Bambamanurung Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah ?
3. Bagaimana sikap atau disposisi dalam implementasi kebijakan dana BOS di SDN INP Bambamanurung Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah ?
4. Bagaimana struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan dana BOS di SDN INP Bambamanurung Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari hasil penelitian ini, yaitu untuk menjelaskan implementasi dana Bantuan Operasional Sekolah di SDN Inpres Bambamanurung efektif dan efisienkah berdasarkan petunjuk dan teknis dan

aspek pada komponen penggunaan, mekanisme penyaluran, dan keterlibatan stakeholder dalam perencanaan penyusunan, dan pelaporan dana BOS.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam menambah bahan kajian perbandingan bagi yang menggunakannya.
2. Secara Praktis, penelitian ini menjadi sumbangan penelitian mengenai permasalahan dan juga masukan bagi lembaga pendidikan dalam Implementasi Kebijakan dana BOS.
3. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi tentang permasalahan yang terjadi dalam Implementasi Kebijakan dana BOS di lembaga pendidikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah penelitian, penelitian terdahulu biasanya digunakan sebagai referensi dasar dan juga sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian. Penelitian terdahulu sangat berguna sebagai bahan perbandingan, adapun penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu :

1. Rosmawaty (2021) dengan judul penelitian “Implementasi Kebijakan Reguler BOS Reguler SMP Negeri di Kabupaten Sumedang”. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi kebijakan BOS Reguler SMP Negeri di Kabupaten Sumedang sudah cukup baik berdasarkan ukuran dan tujuan, sumber daya, keberhasilan kebijakan, sikap atau kecenderungan pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, dan menilai keberhasilan kebijakan.
2. Widodo dkk (2020) dengan judul penelitian “Implementasi Kebijakan Dana BOS di Kota Malang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Malang dalam persoalan sekolah gratis yang berelasi dengan BOS ini semakin memberi peluang masyarakat strata atas dan di sisi lain juga penanganan dana BOS yang diisukan tidak transparan terhadap masyarakat hanyalah presentase sedikit dari banyaknya Tim Manajemen BOS Sekolah diluar Kota Malang. Implementasi kebijakan Bantuan

Operasional Sekolah di Kota Malang ada beberapa masalah, salah satunya masih banyak pihak sekolah yang tidak ingin laporan penggunaan dana BOS diketahui oleh masyarakat atau wali siswa sehingga problematika ini mengakibatkan kecurigaan akan masalah dana BOS tersebut.

3. Gunawan & Sumada (2021) dengan judul penelitian “Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar No 1 Blankiuh Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung”. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar No 1 Blankiuh belum berjalan dengan maksimal karena dalam hal pelaporan masih sering terjadi keterlambatan yang disebabkan oleh kurangnya koordinasi Kepala Sekolah dan pegawai bagian Administrasi. Kendala dalam implementasi program Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar No 1 Blankiuh yaitu kurangnya sosialisasi tentang dana BOS, kurangnya koordinasi dalam pelaporan dana BOS dan rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Dari ketiga penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan, adapun perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan penulis dengan judul “Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SD INP Bambamanurung Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah” yaitu lokus atau tempat penelitian berada di SD INP Bambamanurung. Fokus penelitian yaitu implementasi kebijakan dana BOS di SD INP Bambamanurung bagaimana implementasi kebijakan dapat menjadikan keberhasilan Kebijakan

tentang implementasi Program Bantuan Dana BOS di SD INP Bambamanurung.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun/Judul	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Rosmawaty (2021) dengan judul penelitian “Implementasi Kebijakan Reguler BOS Reguler SMP Negeri di Kabupaten Sumedang”.	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian Lokus Penelitian Indikator
2.	Widodo dkk (2020) dengan judul penelitian “Implementasi Kebijakan Dana BOS di Kota Malang”	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian Lokus Penelitian Indikator
3.	Gunawan & Sumada (2021) dengan judul penelitian “Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar No 1 Blankiuh Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung”	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian Lokus Penelitian

Sumber : Dari Berbagai Sumber

B. Teori dan Konsep

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Harus dipahami bahwa konsep Kebijakan Publik merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “*Public Policy*”, “*public*” = publik dan “*political*” = kebijakan. Dulu kata publik diterjemahkan sebagai kebijakan negara, namun kemudian dianggap kurang tepat dan diganti dengan kata “Kebijakan Publik” yang dianggap lebih tepat. Perkembangan kata “kebijakan” lebih jauh

merupakan terjemahan dari kata “policy” dalam bahasa Inggris, yang berarti mengurus masalah atau kepentingan umum, atau berarti juga administrasi pemerintah. Menurut Nur & Guntur (2019) Kebijakan lebih berat penekanannya pada tindakan (produk) yaitu kebijakan yang ditetapkan secara subjektif. Dalam pengertian operatifnya, kebijakan dapat diartikan sebagai:

1. Suatu penggarisan ketentuan-ketentuan;
2. Yang bersifat sebagai pedoman, pegangan atau bimbingan untuk mencapai kesepahaman dalam maksud, cara dan atau sarana;
3. Bagi setiap usaha dan kegiatan sekelompok manusia yang berorganisasi;
4. Sehingga terjadi dinamisasi gerak tindak yang terpadu, sehaluan dan seirama mencapai tujuan bersama tertentu.

Policy juga diartikan sebagai urusan kebijakan pemerintah atau perangkat administrasi, tidak hanya dalam arti negara yang hanya menyangkut aparatur negara, tetapi juga tata kelola yang menyangkut pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan Pendahuluan Prinsip dasar adalah keputusan atau keputusan untuk bertindak, yang secara langsung mengatur pengelolaan dan distribusi sumber daya alam, keuangan dan sumber daya manusia untuk kepentingan kebaikan bersama, yaitu. orang, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan adalah hasil dari sinergi, kompromi, kemitraan, atau bahkan persaingan antara berbagai ide, teori, ideologi, dan kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.

Kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu. Kebijakan umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Ramdhani & Ramdhani, 2017).

Harus ditekankan bahwa hakikat kebijakan publik harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat. Dalam pandangan ini, dapat diasumsikan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah, ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, yang dapat diwujudkan dalam peraturan, undang-undang, dan lain-lain. Kebijakan publik bersifat wajib dan harus diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali. Sebelum kebijakan umum diterbitkan dan dilaksanakan, kebijakan tersebut harus ditetapkan dan disetujui oleh instansi/lembaga yang berwenang. Peraturan perundang-undangan sebagai produk kebijakan publik merupakan barang politik yang berkaitan dengan kepentingan publik. Namun, dinamika yang berbeda dapat memiliki konsekuensi yang dapat dimitigasi oleh kebijakan publik. Oleh karena itu, kebijakan nasional harus fleksibel, dapat diperbaiki, dan disesuaikan dengan dinamika pembangunan dalam arti tertentu. Penerapan kebijakan publik sangat tergantung pada opini publik.

Implementasi kebijakan merupakan kelanjutan dari proses perumusan dan penguatan kebijakan. Dengan demikian, implementasi politik dapat

diartikan sebagai tindakan yang dilakukan baik oleh individu maupun kelompok pemerintah, yang diarahkan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Efek implementasi kebijakan adalah akibat yang ditimbulkan dari implementasi kebijakan tersebut.

Hasil evaluasi implementasi kebijakan dapat menghasilkan efek yang dimaksudkan atau mencecer Proses implementasi politik tidak hanya menyangkut perilaku otoritas administratif yang bertanggung jawab atas implementasi program dan komitmen terhadap kelompok sasaran, tetapi juga melibatkan jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku masyarakat. Partai politik (pemangku kepentingan). Kegagalan atau ketidacukupan kebijakan biasanya dapat dinilai setelah implementasi kebijakan, dan keberhasilan implementasi kebijakan dapat dianalisis dari segi konsekuensi implementasi kebijakan. Evaluasi kebijakan dapat mencakup isi kebijakan, implementasi kebijakan dan dampak kebijakan efek negatif.

c. Teori Kebijakan Publik

Lebih lanjut (Subarsono, 2011) menghimpun beberapa teori yang berkenaan dengan variabel- variabel yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik, diantaranya:

a) Teori Merilee S. Grindle

Pelaksanaan kebijakan publik dalam teori Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni: isi kebijakan (*content of policy*); dan

lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran tertuang dalam isi kebijakan; jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran; sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan; apakah penempatan lokasi program sudah tepat; apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan pelaksanaannya secara detail; dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

b) Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Teori ini menyebut ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik, yaitu: karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan/ Undang-Undang (*ability of statute to structure implementation*), dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*)

c) Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Teori Meter dan Horn menyatakan paling tidak dijumpai lima variabel yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan kebijakan publik, yakni: standar dan sasaran kebijakan; sumberdaya; komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; karakteristik agen pelaksana; dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.

d. Proses Pembuatan Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik menurut Jones, 1984 yang dikutip dari Prakoso (2019) pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Pembentukan Kebijakan

Kategori	Kegiatan	Produk
Persepsi Agregasi Organisasi Representasi Penyusunan agenda	Masukan masalah ke pemerintah	Masalah Tuntutan (demand) Akses Prioritas
Formulasi Legitimasi Penganggaran	Tindakan dari pemerintah	Proposal Program Anggaran
Implementasi	Tanggapan teknis pemerintah terhadap masalah	Layanan Pembayaran Kemudahan Pengawasan
Evaluasi Penyesuaian "Terminasi"	Masukan program ke pemerintah	Justifikasi Rekomendasi Perubahan Solusi

Sumber : Dosen Prodi Strategi Pertahanan Laut, Fak SP-Unhan RI

Tujuan kebijakan publik dapat dipisahkan dari sisi sumber daya antara kebijakan publik yang ditujukan untuk berbagi sumber daya keuangan pemerintah. Analisis Politik memiliki pemahaman yang mendalam tentang praktek atau penilaian merumuskan kebijakan. Proses penyusunan kebijakan merupakan aktivitas yang tak terpisahkan dari sebuah proses kebijakan , artinya suatu aktivitas yang berlangsung secara simultan (Madani, 2011)

B. Implementasi Kebijakan Publik

a. Pengertian Implementasi

Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang

dibuat oleh Lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan (Mamonto et al., 2018). Menurut (Syaukani, 2006) Implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

Faktanya, proses implementasi kebijakan tidak hanya tentang kegiatan otoritas administratif yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan program dan menciptakan komitmen pada kelompok sasaran, tetapi juga tentang jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi tindakan semua orang. pihak untuk menetapkan pedoman agar tujuan kebijakan publik dapat dilaksanakan sebagai hasil kegiatan pemerintah.

Dari beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan bukan sekedar kegiatan, melainkan kegiatan yang direncanakan secara sungguh-sungguh dan dilaksanakan berdasarkan standar tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, pelaksanaannya tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh tujuan-tujuan selanjutnya. Sedangkan politik

pada hakekatnya adalah tindakan yang mengarah pada tujuan tertentu, bukan sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Politik adalah tentang apa yang sebenarnya dilakukan pemerintah, bukan hanya apa yang ingin dilakukan pemerintah.

b. Unsur-unsur Penting dalam Proses Implementasi

Ada tiga unsur penting dalam proses implementasi

- a. Program atau strategi telah dilaksanakan
- b. Kelompok sasaran, yaitu kelompok orang yang secara sengaja dan pasti akan memperoleh manfaat dari perubahan atau perbaikan program
- c. Unsur pelaksana (pelaksana) bertanggung jawab dan organisasi serta individu bertanggung jawab untuk mewujudkan dan memantau prosedur pelaksanaan.

c. Model Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan ialah strategi dan bentuk pengelolaan berbagai sistem yang berlaku dalam organisasi untuk mencapai tingkat integrasi yang paling tinggi dari dari seluruh yang terlibat (Tjilen, 2019). Sedangkan Menurut Merilee S. Grindle (1980) “Implementasi kebijakan sesungguhnya tidaklah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan”. Di sini Grindle telah meramalkan, bahwa dalam setiap implementasi kebijakan pemerintah pasti dihadapkan pada banyak kendala, utamanya yang berasal dari lingkungan konteks di mana

kebijakan itu akan diimplementasikan. Ide dasar Grindle ini adalah bahwa setelah suatu kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi, maka tindakan implementasi belum tentu berlangsung lancar. Hal ini sangat tergantung pada implementability dari program tersebut. Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle & dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan content of policy dan konteks implementasi context of implementation. Bahwa isi kebijakan terdiri dari kepentingan kelompok sasaran, tipe manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan sumber daya yang dilibatkan. Sementara konteks implementasi mengandung unsur kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, serta kepatuhan dan daya tanggap.

Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika yang *top-down*, maksudnya menurunkan/menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro. Sedangkan formulasi kebijakan mengandung logika *bottom-up*, dalam arti proses ini diawali dengan pemetaan kebutuhan publik atau pengakomodasian tuntutan lingkungan lalu diikuti dengan pencarian dan pemilihan alternatif cara pemecahannya, kemudian diusulkan untuk ditetapkan (Saefullah, 2006).

Implementasi kebijakan dari Van Meter Dan Van Horn (1975) yang memiliki enam indikator yaitu 1) standar dan sasaran kebijakan, 2) sumber daya 3) karakteristik organisasi pelaksana 4) komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana 5) sikap para pelaksana 6) lingkungan Sosial, ekonomi, dan politik (Fauziah & Arif, 2021)

Model implementasi kebijakan Grindle (1980) ukuran keberhasilan implementasi dapat dikumpulkan dari proses dengan menanyakan apakah implementasi program sudah seperti didefinisikan, yaitu dengan melihat program aksi masing-masing, dan kedua apakah tujuan program telah tercapai. Kebijakan penegakan publik dipengaruhi oleh kelayakan kebijakan itu sendiri. Isi kebijakan mencakup:

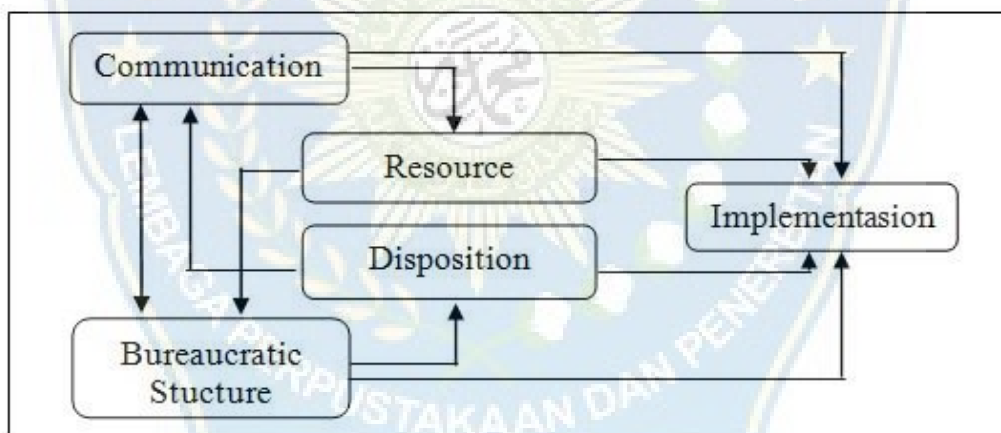
- a. Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan;
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan;
- c. Derajat perubahan yang diinginkan;
- d. Kedudukan pembuat kebijakan;
- e. (siapa) pelaksana program;
- f. Sumber daya yang dikerahkan;

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat;
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa;
- c. Kepatuhan dan daya tanggap.

Menurut Edwards III implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai bagian dari tahapan proses politik yang terletak di antara tahapan perumusan strategi dan konsekuensi dari kebijakan (output, result). Selain itu, Edward III mengidentifikasi aspek-aspek yang diduga kuat mendukung implementasi kebijakan tersebut, yaitu:

Komunikasi, sumber daya, sikap atau attitude para pelaksana dan struktur birokrasi. Keempat aspek tersebut mempengaruhi implementasi kebijakan baik secara langsung maupun tidak langsung, dan setiap aspek mempengaruhi aspek lainnya (Wahyudi, 2016). Berikut gambar bagan teori implementasi kebijakan menurut Edward III



Gambar 2.1 Bagan Implementasi Kebijakan Edward III (Sumber: (J. Widodo, 2010))

a. Kewenangan/ Struktur Birokrasi

Kewenangan adalah wewenang/legitimasi pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditentukan secara politis (Afandi & Warjio, 2015). Kewenangan ini mengacu pada struktur birokrasi yang terkait dengan

tugas/strategi kelembagaan atau individu pelaksana kebijakan. Ciri utama birokrasi biasanya tertuang dalam metode kerja atau standar operasional prosedur (SOP) dan fragmentasi organisasi.

b. Komunikasi

Ilmu komunikasi pada dasarnya adalah ilmu pengetahuan tentang peristiwa komunikasi yang diperoleh melalui suatu penelitian tentang sistem, proses, dan pengaruhnya yang dilakukan secara rasional dan sistematis, serta kebenarannya dapat diuji dan digeneralisasikan (Sendjaja, 2019). Komunikasi mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik, dimana komunikasi yang tidak baik dapat menimbulkan dampak-dampak buruk bagi pelaksanaan kebijakan. Dimensi komunikasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik diantaranya: transmisi, konsistensi, dan kejelasan (Winarno, 2012). Pencapaian keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik mensyaratkan pelaksana untuk mengetahui yang harus dilakukan secara jelas; tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan kebijakan. Keterampilan komunikasi diselaraskan sehingga mereka yang melakukan kegiatan dapat saling bernegosiasi dan menemukan titik-titik kesepakatan/kesepakatan yang saling menguntungkan. Konsensus yang dihasilkan dapat meningkatkan kinerja pribadi di tempat kerja dengan menemukan kondisi win-win solution untuk setiap masalah.

c. Sumber Daya

Implementasi kebijakan harus didukung oleh ketersediaan sumber daya (orang, bahan dan metode). Penegakan kebijakan publik harus menyeluruh, jelas dan konsisten, tetapi jika pelaksana tidak memiliki sumber daya untuk melakukannya, kebijakan biasanya tidak ditegakkan secara efektif. Tanpa dukungan sumber daya, kebijakan hanyalah dokumen yang belum diimplementasikan untuk memberikan solusi atas masalah masyarakat yang ada atau upaya penyampaian layanan masyarakat. Oleh karena itu, sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan publik. Langkah-langkah implementasi kebijakan publik meliputi: sumber daya manusia, informasi, dana, keterampilan, dan alat pendukung lainnya yang memadai (Afandi & Warjio, 2015).

d. Disposisi atau sikap dari pelaksana

Sifat pelaksana kebijakan, seperti Komitmen, disiplin, jujur, cerdas dan berkarakter demokratis. Apabila pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang baik, maka dia diduga kuat akan menjalankan kebijakan dengan baik, sebaliknya apabila pelaksana kebijakan memiliki sikap atau cara pandang yang berbeda dengan maksud dan arah dari kebijakan, maka dimungkinkan proses pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan efektif dan efisien. Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan dukungan atau hambatan terhadap pelaksanaan kebijakan tergantung dari kesesuaian kompetensi dan sikap dari pelaksanaan. Karena itu, pemilihan dan penetapan personalia pelaksana kebijakan dipersyaratkan individu-individu yang

memiliki kompetensi dan dedikasi yang tepat pada kebijakan yang telah ditetapkan (Afandi & Warjio, 2015).

D. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dana BOS merupakan program pemerintah hasil redistribusi pendanaan yang disalurkan ke sektor pendidikan. Tujuan dari program ini adalah untuk meringankan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu, dan untuk memudahkan siswa lainnya. Dengan BOS, siswa diharapkan mendapatkan pendidikan berkualitas hingga 9 (sembilan) tahun. Program ini menysasar siswa sekolah dasar baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia.

Menurut Kemenkeu (2022) Dana BOS adalah program yang diusung Pemerintah untuk membantu sekolah di Indonesia agar dapat memberikan pembelajaran dengan lebih optimal. Bantuan yang diberikan melalui dana BOS yakni berbentuk dana. Dana tersebut dapat dipergunakan untuk keperluan sekolah, seperti pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah hingga membeli alat multimedia untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.

Untuk penyaluran dana BOS, Pemerintah telah mengatur pokok kebijakannya, yaitu :

1. Nilai satuan biaya BOS bervariasi sesuai karakteristik masing-masing daerah
2. Penggunaan dana BOS tetap bisa fleksibel,

3. Dana BOS dapat digunakan untuk keperluan persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM)
4. Pelaporan penggunaan Dana BOS dilakukan secara daring
5. Pelaporan penggunaan BOS secara online di laman kemdikbud.go.id, dan
6. Pelaporan menjadi syarat penyaluran dana BOS tahap

Dan juga menurut Kemenkeu (2022) Untuk besaran Dana BOS Reguler yang disalurkan tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dihitung berdasarkan jumlah peserta didik yang tercatat di Dapodik yang dikalikan dengan satuan biaya per masing-masing tingkat pendidikan. Akan tetapi, nilai satuan BOS tiap sekolah akan berbeda tergantung dari daerah yang dihitung berdasarkan dua metode, yakni:

1. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dari Badan Pusat Statistik, dan
2. Indeks Besaran Peserta Didik (IPD) yaitu berdasarkan jumlah peserta didik per sekolah yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Hal itu terjadi karena beberapa daerah kesulitan mendapatkan bahan baku dan penyedia jasa konstruksi untuk pembangunan sekolah. Tentu saja kondisi ini mempengaruhi fungsi sekolah. Dengan demikian, semakin kompleks letak geografisnya, semakin tinggi IKK-nya. Dengan demikian, nilai porsi dana BOS juga lebih tinggi.

Dengan dana bersama, sekolah dapat langsung membeli semua kebutuhan belajar seperti membangun sekolah, mengembangkan perpustakaan untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Negara memberikan

kewenangan 100% kepada sekolah untuk menggunakan dana BOS, tetapi harus digunakan untuk kebutuhan sekolah, bukan untuk kepentingan pribadi

Selain itu, apabila dana telah digunakan wajib menginformasikan penggunaan dana BOS melalui laman bos.kemdikbud.go.id. Jika sekolah tidak menyampaikan laporan, maka dana BOS tahap selanjutnya tidak akan disalurkan. Dana BOS disalurkan melalui jaringan KPPN di seluruh Indonesia, dan masing-masing KPPN meliputi penyaluran baik dari sekolah negeri maupun swasta baik SD, SMP, SLB atau sekolah sejenis. Mekanisme distribusi dan monitoring dilaksanakan melalui aplikasi OM SPAN. KPPN, Kanwil DJP dan Lembaga Keuangan Daerah Pemda memiliki pengguna aplikasi OM SPAN yang disesuaikan dengan tingkat kemampuannya untuk mendukung alokasi dana BOS. Semua entitas ini dapat mengontrol alokasi dana BOS kapan saja.

Berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2021, pengeluaran dana BOS dibagi menjadi tiga tahap, berdasarkan penyelesaian pelaporan yaitu. pengalihan pembayaran tahap I setelah penyampaian laporan penggunaan tahap II BOS tahap II tahun lalu. pembayaran setelah laporan penggunaan BOS tahap III tahun terakhir disampaikan, tahap III dibayarkan setelah laporan penggunaan BOS tahap I tahun buku disampaikan.

a. Kebijakan Dana BOS Tahun 2023

Menurut Kemendikbud (2023) yang merujuk pada Permendikbudristek No 63 Tahun 2022 Penerima Dana BOS Reguler harus memenuhi persyaratan:

1. Memiliki NPSN yang terdata pada Aplikasi Dapodik.

2. Telah mengisi dan melakukan pemutakhiran data pada Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan paling lambat tanggal 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya.
3. Memiliki Rekening Satuan Pendidikan atas nama Satuan Pendidikan.
4. Memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Aplikasi Dapodik.
5. Tidak merupakan Satuan Pendidikan kerja sama.
6. Tidak merupakan Satuan Pendidikan yang dikelola oleh kementerian/lembaga lain.

Komponen penggunaan Dana BOS Reguler meliputi:

1. Penerimaan Peserta Didik baru
2. Pengembangan perpustakaan
3. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler
4. Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran
5. Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah
6. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan
7. Pembiayaan langganan daya dan jasa
8. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah
9. Penyediaan alat multimedia pembelajaran
10. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian
11. Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan
12. Pembayaran honor

Laporan Realisasi Penggunaan Dana BOSP

1. Kepala Satuan Pendidikan penerima Dana BOSP harus menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOSP melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh Kementerian.
2. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana BOSP dilaksanakan paling lambat:
 - a. Tanggal 31 Juli tahun anggaran berkenaan untuk realisasi penggunaan dana minimal 50% dari Dana BOP PAUD Reguler, BOS Reguler, dan Dana BOP Kesetaraan Reguler yang diterima pada tahap I
 - b. Tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya untuk laporan realisasi keseluruhan penggunaan Dana BOSP yang diterima dalam satu tahun anggaran.
- I. Laporan realisasi penggunaan dana tahap I digunakan sebagai dasar penyaluran tahap II tahun anggaran berkenaan.
- II. Laporan realisasi keseluruhan penggunaan dana digunakan sebagai dasar penyaluran tahap I pada penerimaan Dana BOSP tahun anggaran berikutnya.

Mekanisme alokasi dana BOSP normal sekarang hanya 2 tahap. Sebelumnya, mekanisme alokasi dana BOSP normal dilaksanakan dalam 3 tahap yaitu. Januari (30%), April (40%) dan September (30%) per properti. Sebaliknya, alokasi dana untuk tahun 2023 hanya dilakukan dalam dua tahap, paling cepat pada Januari dan Juli (masing-masing 50%).

b. Perencanaan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dalam merencanakan pengelolaan dana BOS, kepala sekolah, bendahara sekolah, bagian dewan guru dan komite sekolah ikut serta sebagai penanggung jawab pengelolaan dana BOS. Proses perencanaan diawali dengan penyusunan RAKS oleh administrasi sekolah, guru dan komite sekolah, setelah itu melibatkan beberapa stakeholder sekolah yaitu stakeholder sekolah yang menjalankan perannya yaitu administrasi pengawas, dewan guru dan komite sekolah. Tahapan persiapan RAKS dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan sekolah selama setahun, kemudian merencanakan anggaran, setelah itu tim mendistribusikannya kepada kepala sekolah, guru dan komite sekolah, setelah itu RAKS dipamerkan di sekolah. papan pengumuman sehingga semua orang di sekolah mengetahui anggaran.

c. Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dalam mengelola tanggung jawab BOS, harus mengelola beberapa buku yang dibuat sesuai tata kelola BOS yaitu buku kas umum, buku kas umum, buku pembantu bank dan buku keringanan pajak. Karena bendahara harus memahami buku-buku tersebut, jika tidak maka akan menimbulkan berbagai dampak yang tidak baik bagi sekolah. Selain itu, sekolah juga harus menyusun laporan triwulan pelaksanaan penggunaan dana BOS (formulir BOS-K7 dan BOS-K7A) setiap akhir triwulan untuk keperluan monitoring dan audit, menyiapkan laporan tahunan, yang disusun setiap triwulan. Laporan yang disampaikan ke SKPD tentang penggunaan dana BOS, pembukuan yang baik (formulir BOS-K3, BOS-K, BOS-K5 dan BOS-K6)

Banyak faktor yang menyebabkan belum tercapainya tujuan pengelolaan dana, antara lain: Pertama: , dari segi perencanaan, sekolah anggaran BOS yang diberikan masih terlalu besar, kecil dibandingkan dengan jumlah biaya operasional yang harus dikeluarkan sekolah. manual pengguna, tetapi kurangnya mencapai orang tua menciptakan kesalahpahaman tentang uang BOS di banyak partai politik.

d. Pengalokasian/ pencairan dana BOS

Menurut Annisa (2020) Pengalokasian/ pencairan dana BOS dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Tim manajemen pusat mengumpulkan data jumlah siswa tiap sekolah melalui tim manajemen BOS provinsi, kemudian menetapkan alokasi dana BOS tiap provinsi
- b. Atas dasar jumlah siswa tiap sekolah, tim manajemen BOS pusat membuat alokasi dana BOS tiap provinsi yang dituangkan dalam DIPA provinsi
- c. Tim manajemen BOS provinsi dan tim manajemen BOS Kabupaten/Kota melalui verifikasi ulang data jumlah siswa tiap sekolah sebagai dasar dalam menetapkan alokasi di tiap sekolah
- d. Tim manajemen BOS Kabupaten/Kota menetapkan sekolah yang tersedia menerima BOS melalui surat keputusan (SK). SK penetapan sekolah yang menerima BOS ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan dewan pendidikan. SK yang telah ditandatangani dilampirkan daftar nama sekolah dan besar dana bantuan yang tersedia menerima BOS harus menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan

- e. Tim manajemen BOS Kabupaten/Kota mengirim SK alokasi BOS dengan melampirkan daftar sekolah ke tim manajemen BOS provinsi, tembusan ke bank/pos penyalur dana dan sekolah penerima BOS.

e. Komponen yang dapat dibiayai menggunakan dana BOS (Permendikbud, 2022)

- a. Penerimaan Peserta Didik Baru
- b. Pengembangan Perpustakaan
- c. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler
- d. Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran
- e. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikanaksanaan administrasi kegiatan sekolah
- f. Pembiayaan langganan daya dan jasa
- g. Penyediaan alat multimedia pembelajaran
- h. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah
- i. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian
- j. Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan
- k. Pembayaran honor

f. Komponen yang tidak dapat dibiayai menggunakan dana BOS (Permendikbud, 20220)

- a. Disimpan dengan maksud dibungakan;
- b. Dipinjamkan kepada pihak lain;

- c. Membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS atau software sejenis;
- d. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah, antara lain studi banding, tur studi (karya wisata), dan sejenisnya;
- e. Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD kecamatan/kabupaten/kota/provinsi/pusat, atau pihak lainnya;
- f. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru; Membiayai akomodasi untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh di luar dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan/atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- g. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah);
- h. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
- i. Membangun gedung/ruangan baru, kecuali pada SD/SMP yang belum memiliki prasarana jamban/WC dan/atau kantin sehat;
- j. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
- k. Menanamkan saham;
- l. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat/pemerintah daerah atau sumber lainnya;
- m. Membiayai iuran dalam rangka upacara peringatan hari besar nasional, dan membiayai penyelenggaraan upacara/acara keagamaan; dan/atau

- n. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/ sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan/atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

C. Kerangka Fikir

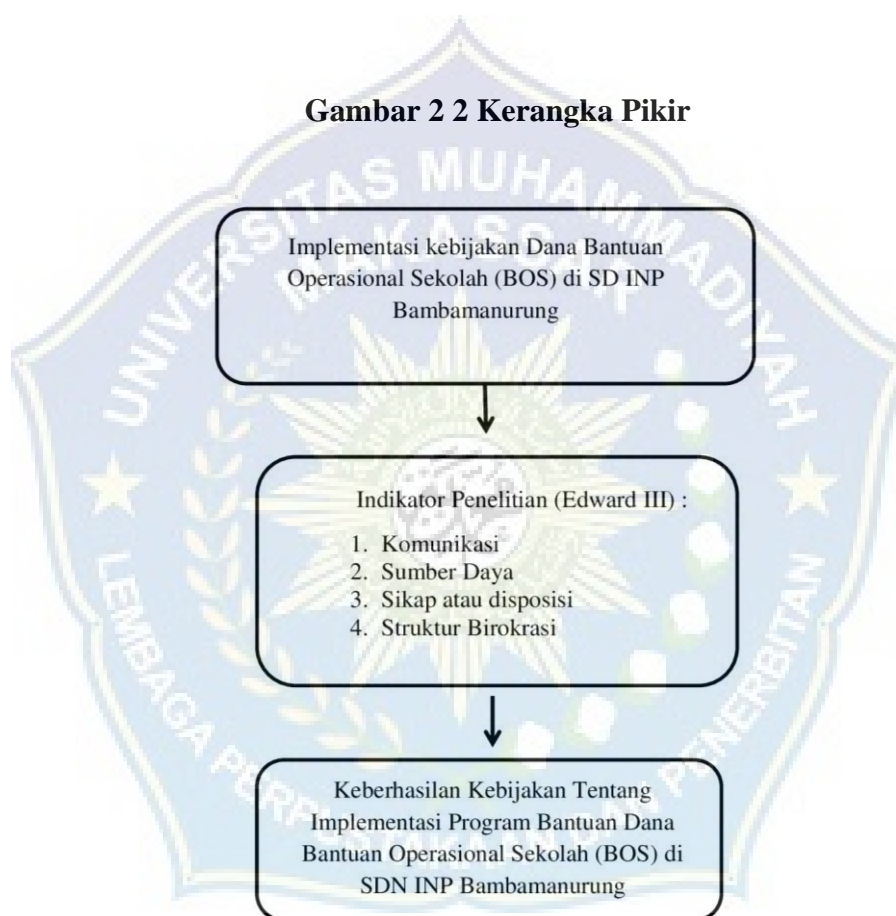
Manfaat BOS bagi masyarakat dalam menyekolahkan anaknya, harapan masyarakat tentang adanya kebijakan BOS yaitu sekolah tidak memungut biaya, kualitas pembelajaran meningkat, sarana dan prasarana sekolah gratis dan memadai, kualitas lulusan sekolah yang gratis memiliki kemampuan yang memadai dan manfaat yang dirasakan dengan adanya BOS sebagai kebijakan sekolah gratis semua anak yang ada pada usia sekolah bisa sekolah dan biaya sekolah menjadi ringan atau gratis sama sekali.

Faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan BOS sebagai implementasi sekolah gratis, sebagai faktor pendorong dengan sub variabel masyarakat memilih sekolah gratis untuk menyekolahkan anaknya, angka putus sekolah, angka tinggal sekolah, dan faktor penghambat dan biaya yang kucurkan pemerintah berkaitan dengan sekolah gratis memadai, dana tersebut lancar diterima sekolah setiap bulannya dan sarana dan prasarana yang dibangun melalui biaya sekolah gratis dari pemerintah memadai

Penelitian ini dilakukan di SD INP Bambamanurung, penelitian ini tentang implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SD INP

Bambamanurung berdasarkan indikator : Komunikasi, Sumber daya, Disposisi atau sikap, dan Struktur Birokrasi. Dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan kepada SD INP Bambamanurung. Maka model kerangka fikir yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut

Gambar 2 2 Kerangka Pikir



D. Fokus Penelitian

Berdasarkan yang sudah peneliti jelaskan bahwa pada dokus peneliti yaitu Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SD INP Bambamanurung dimana peneliti ingin mengetahui seberapa

berpengaruhnya bantuan dana BOS untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Pendidikan di SD INP Bambamanurung.

E. Deskripsi Fokus

Adapun sub-sub fokus dari fokus penelitian Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah Terhadap Kualitas Pelayanan Pendidikan di SD INP Salupangkang sebagai berikut :

1. Faktor Komunikasi

Terdiri dari Transmision (Adanya transmisi kebijakan dari Direktorat manajemen pendidikan dasar dan menengah tentang sekolah gratis melalui dana BOS), *Clarity*/kejelasan (adanya kejelasan tujuan dan sasaran kebijakan sekolah gratis melalui dana BOS), *Consistency*/ Konsisten.

2. Faktor Sumber Daya

Terdiri dari Staff yaitu tersedianya pelaksana kebijakan sekolah gratis melalui dana BOS, tersedianya tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah yang menyelenggarakan sekolah gratis, *Size* (ukuran) yaitu Jumlah staf seimbang dengan pekerjaan mengelola dana BOS, *Skill* (keahlian) yaitu Pengelola bos memiliki skill sesuai dengan latar belakang pendidikannya, *Budgetary/Financial* (keuangan) Dana BOS, *Facility*/Sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan dan *Information and Authority* (informasi dan Kewenangan).

3. Faktor Disposisi/Sikap

Terdiri dari *Effect of Disposition* yaitu sejauh mana komitmen penanggung jawab sekolah gratis melalui dana BOS dan sitem mendukung

pelaksanaan sekolahn gratis melalui dana BOS, *Staffing The Bureaucracy* yaitu Penempatan staff yang memiliki tanggung jawab terhadap kebijakan skolah gratis melalui dana BOS, *Incentives* yaitu danya insentif yang mempengaruhi perilaku pengelola sekolah gratis melalui dana BOS

4. Struktur Birokrasi

Terdiri dari *Fragmentation* yaitu adanya pembagian wewenang pelaksana kebijakan sekolah gratis melalui dana BOS untuk tiap jenjang mulai dari pusat hingga daerah, Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yaitu adanya SOP dalam pelaksanaan kebijakan sekolah gratis melalui dana BOS di kantor dinas.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi

Waktu dan penelitian yang di butuhkan dalam penelitian ini kurang lebih selama 1 bulan lamanya terhitung dari tanggal 21 Juni 2023 sampai 15 Juli 2023. Adapun lokasi penelitian bertempat di SD INP Bambamanurung. SD INP Bambamanurung dipilih menjadi lokasi penelitian karena SD INP Bambamanurung merupakan salah satu instansi yang ikut berpartisipasi menerima Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah terhadap Kualitas Pelayanan Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar di SD INP Bamabamanurung. Faktor pendukung dan penghambat implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar SD INP Bambamanurung.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomologi karena melakukan pengumpulan data dengan melalui wawancara disertai dnegan data secara tertulis di SD INP Bambamanurung. Agar tujuan dari peneliti bisa akurat sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan dengan

dokumen-dokumen, kemudian dilakukan observasi untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya atau kejadian secara nyata yang terjadi dilapangan.

C. Informan Penelitian

Informan (narasumber) adalah orang-orang yang menjadi informan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan, dan peneliti mewawancarai informan tersebut. Informan yang dipilih adalah informan yang benar-benar mengerti dan mengetahui masalah yang dimaksud. Pemilihan informan dapat berubah dan berkembang sesuai dengan kebutuhan informasi peneliti untuk mendapatkan informasi yang akurat. Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan *purposive sampling* yaitu menggunakan teknik *sampling subyektif* yang mengasumsikan bahwa informan yang dipilih memiliki informan yang diperlukan untuk penelitian yang akan dilakukan. Informan dari penelitian ini adalah

Tabel 3.1 Daftar Tabel Informan Penelitian

NO	Nama	Inisial	Jabatan
1	Sukarmin,S.Pd	SK	Komite
2	Komari Edi Siswanto,S.Pd.I	KE	Kepala Sekolah
3	Ir.Marten Saranga	MS	Bendahara
4	Eka Nur Imamah,S.Pd	EN	Guru

Sumber : SDN INP Bambamanurung 2023

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan yaitu :

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data di mana pewawancara (peneliti) mengajukan pertanyaan kepada responden selama pengumpulan data. Dalam wawancara ini, penulis melakukan Q&A dengan mengajukan pertanyaan terstruktur langsung kepada responden yang dianggap mengerti, mengetahui dan menjadi bagian dari penelitian ini

2. Observasi

Proses pengumpulan data secara observasi yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung atau berkunjung langsung pada tempat yang diteliti dalam hal ini di SD INP Bambamanurung.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pencarian informasi sejarah, sehingga materi dokumenter sejarah memegang peranan yang sangat penting dalam penelitian ini. Dokumen ini mengkaji arsip-arsip yang terkait dengan kajian, seperti penyaluran dana BOS, surat-surat terkait penyaluran dana BOS, surat perintah terkait dana BOS, dokumen terkait penyaluran dana BOS, dll.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisi data merupakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengelola data menjadi hasil penelitian dimana data yang di peroleh melalui observasi dan wawancara di lapangan dapat dimanfaatkan untuk

menuimpulkan hasil penelitian. Dimana dalam teknik analisis data ada 3 komponen yang harus diperhatikan yaitu :

1. Reduksi

Pengurangan adalah proses analitis untuk ditinjau data kasar dari lapangan. Data mentah kemudian diurutkan dan diklasifikasikan antara penting dan tidak penting. Setelah itu, informasi yang tidak perlu dibuang. Dalam penelitian ini, setelah penulis mengumpulkan data, langkah selanjutnya adalah reduksi data. Kemudian reduksi data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi diuraikan secara tertulis.

2. Penyajian Data

Penyajian informasi merupakan rancangan informasi yang muncul dari penelitian di lapangan dan disusun secara terpadu dan mudah dipahami. Dalam hal ini, peneliti menyajikan data dengan cara menyederhanakan informasi agar lebih mudah untuk dijelaskan. Penyajian informasi digunakan dalam bentuk teks naratif untuk memudahkan penyajian dan penarikan kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila data kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan

data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

F. Teknik Pengabsahan Data

Salah satu cara paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian ini adalah dengan melakukan triangulasi. Teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada atau triangulasi bermakna silang yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain serta pengecekan pada waktu yang berbeda. Ada tiga macam Triangulasi, yaitu :

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dilakukan dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data dapat diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau kusioner.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Irnangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim penelitian lain yang diberi tugas malukan pengumpulan data.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Kabupaten Mamuju Tengah

Kabupaten Mamuju Tengah Secara Geografis terletak pada Bagian Barat Pulau Sulawesi dan berposisi pada bentangan Selat Makassar, yakni $1^{\circ} 47' 82'' - 2^{\circ} 17' 31''$ Lintang Selatan, $119^{\circ} 08' 13'' - 119^{\circ} 24' 08''$ Bujur Timur, Jakarta ($0^{\circ} 0' 0''$, Jakarta = $160^{\circ} 48' 28''$ Bujur Timur Green Witch). Dengan batas wilayah :

- Utara Sungai Benggaulu Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara;
- Timur Desa Batu Bicara, Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan;
- Selatan Sungai Karama dan Desa Tarailu Kecamatan Sampaga, Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju
- Barat Selat Makassar

Luas wilayah Kabupaten Mamuju Tengah adalah 3.100,87 km², secara administrasi pemerintahan, terdiri atas 5 Kecamatan, 54 Desa, dan 3 (UPT) Unit Pemukiman Transmigrasi. Ibukota kabupaten terletak di wilayah Benteng Kayu Mangiwang Kecamatan Tobadak. Topografi Kabupaten Mamuju Tengah umumnya datar di sebelah barat, tetapi semakin ke timur, menjadi lebih bergelombang dan berbukit. Konfigurasi

wilayah Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan kemiringan lereng berkisar antara 0-2 persen seluas 62.936,98 ha; 2-5 persen seluas 13.190,77 ha; 5-15 persen seluas 38.544,73 ha; 15-40 persen seluas 144.055,16 ha; dan luas terbesar seluas 29.734,70 ha di Kecamatan Budong-Budong. Kecamatan Tobadak memiliki kemiringan lereng antara 2-15 persen seluas 25.066 ha. Jika kita melihat bentuk Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan kemiringan lereng, bagian yang datar adalah bagian sebelah barat yang berbatasan dengan Selat Makassar. Sebaliknya, semakin ke timur, kemiringan lereng menjadi lebih tinggi karena kondisi tanah yang bergelombang dan berbukit. Bagian sebelah barat yang berbatasan dengan Selat Makassar adalah bagian yang datar.

Roda pembangunan dapat digerakkan oleh kualitas sumber daya manusia. Menurut data yang dikumpulkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah, tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Mamuju Tengah sangat terbatas. Sebanyak 36.166 orang, sebagian besar hanya tamat SD, dan hanya 7 orang yang tamat strata tiga.

2. Gambaran Umum SD INP Bambamanurung Kecamatan Topoyo

SD INP Bamabamanurung terletak di Desa Bambamanurung Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat dengan mayoritas penduduk yang sangat memahami pentingnya pendidikan. SD INP Bambamanurung didirikan pada tahun 1994 dengan luas tanah 1 ha, merupakan lahan milik pemerintah pusat dengan Nomor

Pokok Sekolah Nasional 40600311. SD INP Bambamanurung memiliki visi misi sebagai berikut :

a. Visi

Dalam merumuskan visi, pihak-pihak terkait (stakeholders) melakukan musyawarah sehingga visi tersebut benar-benar mewakili aspirasi semua pihak yang terkait. Harapannya, semua pihak yang terkait dalam kegiatan pembelajaran (guru, karyawan, peserta didik, dan wali peserta didik) benar - benar menyadari visi tersebut untuk selanjutnya memegang komitmen terhadap visi yang telah disepakati bersama. Adapun visi SD Inpres Bambamanurung adalah sebagai berikut:

"Terwujudnya Sekolah yang maju, mandiri, insan yang cerdas, Berprestasi dan bertaqwah Kepada Tuhan Maha Esa"

Indikator :

1. Unggul dalam prestasi akademik dan non akademik.
2. Unggul dalam bidang ketrampilan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan dalam pembelajaran Unggul dalam bidang penghayatan dan pengamalan ajaran agama.
3. Unggul dalam bidang kedisiplinan, ketertiban dan keamanan.

b. Misi

Misi SD Inpres Bambamanurung Untuk mencapai visi sebagai sekolah yang terdepan, terbaik, dan terpercaya, perlu dilakukan suatu misi berupa kegiatan jangka panjang dengan arah yang jelas dan sistematis. Berikut

misi SD Inpres Bambamanurung yang dirumuskan berdasarkan visi sekolah.

1. Menciptakan generasi yang memiliki akal sehat, dinamis, aktual dan beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Melaksanakan pembelajaran yang aktif, efektif dan menyenangkan bagi warga belajar sesuai dengan potensi yang di miliki secara optimal;
3. Membentuk sumber daya manusia yang aktif, kreatif, inovatif sesuai dengan perkembangan zaman;
4. Mengembangkan minat, bakat, dan potensi siswa secara maksimal melalui kegiatan ekstrakurikuler;
5. Mengembangkan dan membiasakan prilaku disiplin warga sekolah;
6. Menjadikan sekolah terpercaya di masyarakat

Kondisi siswa pada tahun akademik 2023/2024: 111 siswa dalam enam kelompok belajar. 20% peserta didik SD INP Bambamanurung berada dalam kategori kurang mampu sedangkan 80% orang berada dalam kategori sedang. Sekolah membantu siswa yang kurang mampu dengan mengajukan dana Bantuan Siswa Miskin dan memberikan bantuan kepada siswa berupa pakaian, buku, dan sepatu sekolah. Sekolah juga memberikan hadiah kepada siswa yang berprestasi, seperti duplikat piala, seragam sekolah, dan perlengkapan yang dibutuhkan.

Kondisi pendidik dan tenaga pendidikan di SD INP Bambamanurung cukup memadai dengan jumlah 1 Kepala Sekolah, 5 guru

PNS, 2 Non PNS. Dilihat dari jenjang pendidikan tenaga kependidikan di SD INP Bambamanurung rata-rata berpendidikan S1.

Sarana dan prasarana di SD INP Bambamanurung belum terlalu memadai dengan 6 ruang kelas dengan daya tampung 25 anak dan 1 perpustakaan dengan taman bunga didepannya. Selain ruang kelas SD INP Bambamanurung juga memiliki satu ruang kepala sekolah dengan ukuran 7 x 8 memiliki 4 WC siswa, lemari kantor, bak sampah 6 buah, rak buku, meja/kursi guru 6 buah, meja/kursi siswa 114 buah, papan tulis 6 buah, 1 tiang bendera dan bel sekolah 1 buah. SD ini belum memiliki ruang guru, musholla, UKS, lab komputer dan ruang kantin. Kelengkapan administrasi kelas yang ditempel di dinding adalah gambar presiden/wakil presiden, gambar garuda, dan gambar Gubernur/bupati.

Kepala sekolah, guru, dan komite sekolah membentuk RKAS di SD INP Bambamanurung. Komite sekolah menandatangani usulan-usulannya setelah dibahas secara langsung oleh pemangku kepentingan dan komite sekolah.

Sekolah masih bergantung pada dana BOS APBN dan dana pendidikan gratis yang diberikan oleh pemerintah provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Mamuju Tengah. Sekolah belum menerima sumber dana tambahan dari koperasi sekolah. Setiap akhir tahun kenaikan kelas, guru akan membagikan tabungan siswa yang dikelola oleh masing-masing wali kelas. Sekolah memiliki RKAS yang ditempel di dinding, dan semua guru

tahu anggaran BOS yang dibuat laporan rutin. Sekolah tidak memiliki sumber donasi lain selain dana BOS. Rencana keuangan sekolah transparan, efektif, dan akuntabel, dan dana tersebut digunakan dengan tepat sasaran. Namun, pencairan dana BOS belum tepat waktu, yang menghambat operasi sekolah. Sekolah telah menerima dana BOS sesuai dengan jumlah siswa dan selalu membuat laporan.

B. Hasil Penelitian

Menurut Nur & Guntur (2019) Kebijakan lebih berat penekanannya pada tindakan (produk) yaitu kebijakan yang ditetapkan secara subjektif. Harus ditekankan bahwa hakikat kebijakan publik harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat. Dalam pandangan ini, dapat diasumsikan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah, ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, yang dapat diwujudkan dalam peraturan, undang-undang, dan lain-lain. Kebijakan publik bersifat wajib dan harus diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali. Sebelum kebijakan umum diterbitkan dan dilaksanakan, kebijakan tersebut harus ditetapkan dan disetujui oleh instansi/lembaga yang berwenang. Peraturan perundang-undangan sebagai produk kebijakan publik merupakan barang politik yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Menurut (Syaukani, 2006) Implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana

diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat. Faktanya, proses implementasi kebijakan tidak hanya tentang kegiatan otoritas administratif yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan program dan menciptakan komitmen pada kelompok sasaran, tetapi juga tentang jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi tindakan semua orang. Pihak untuk menetapkan pedoman agar tujuan kebijakan publik dapat dilaksanakan sebagai hasil kegiatan pemerintah.

Dana BOS merupakan program pemerintah hasil redistribusi pendanaan yang disalurkan ke sektor pendidikan. Tujuan dari program ini adalah untuk meringankan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu, dan untuk memudahkan siswa lainnya. Dengan BOS, siswa diharapkan mendapatkan pendidikan berkualitas hingga 9 (sembilan) tahun. Program ini menyoal siswa sekolah dasar baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Menurut Kemenkeu (2022) Dana BOS adalah program yang diusung Pemerintah untuk membantu sekolah di Indonesia agar dapat memberikan pembelajaran dengan lebih optimal. Bantuan yang

diberikan melalui dana BOS yakni berbentuk dana. Dana tersebut dapat dipergunakan untuk keperluan sekolah, seperti pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah hingga membeli alat multimedia untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.

Berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2021, pengeluaran dana BOS dibagi menjadi tiga tahap, berdasarkan penyelesaian pelaporan yaitu. pengalihan pembayaran tahap I setelah penyampaian laporan penggunaan tahap II BOS tahun lalu. Pembayaran setelah laporan penggunaan BOS tahap III tahun terakhir disampaikan, tahap III dibayarkan setelah laporan penggunaan BOS tahap I tahun buku disampaikan. Tetapi peraturan mengenai alokasi dana BOS tersebut telah diubah. Menurut Kemendikbud (2023) yang merujuk pada Permendikbudristek No 63 Tahun 2022 Penerima Dana BOS Reguler Mekanisme alokasi dana BOSP normal sekarang hanya 2 tahap. Sebelumnya, mekanisme alokasi dana BOSP normal dilaksanakan dalam 3 tahap yaitu. Januari (30%), April (40%) dan September (30%) per properti. Sebaliknya, alokasi dana untuk tahun 2023 hanya dilakukan dalam dua tahap, paling cepat pada Januari dan Juli (masing-masing 50%).

Terkait dengan permasalahan yang ada dalam bantuan operasional sekolah di SD INP Bambamanurung adalah mengenai, **Pertama**, gerak langkah sekolah telah dibatasi oleh program BOS. Karena tidak adanya partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan, program pendidikan tidak berkualitas, dan dana BOS dianggap kurang memadai karena pada

dasarnya hanya untuk menggratiskan biaya operasional. **Kedua**, dana BOS tidak dibayarkan sesuai jadwal. Berdasarkan petunjuk teknis tentang penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dana disalurkan ke seluruh rekening sekolah oleh Tim Manajemen BOS Provinsi setahun dua kali. Dana ini disalurkan ke seluruh rekening sekolah berdasarkan data yang dikirim dari Dinas Kabupaten/Kota. Keterlambatan dalam penyaluran biasanya disebabkan oleh fakta bahwa Tim Manajemen BOS Provinsi terlambat menerima data dari Tim Manajemen BOS Provinsi. Keterlambatan pencairan dana BOS oleh sekolah karena beberapa Dinas dan Kota melarang mencairkan dana BOS sampai laporan pertanggungjawaban periode BOS sebelumnya dikirim. **Ketiga**, pengelola dana BOS terbatas pengelolaan dana BOS di sekolah dasar membutuhkan sumber daya manusia yang baik. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah mereka yang memiliki iman dan ketaqwaan yang kuat terhadap Allah sebagai dasar menjalankan tugas dan fungsinya dengan amanah. Mereka juga harus memiliki akhlak yang mulia dan berdisiplin, memiliki ketrampilan yang memadai dalam ketatausahaan dan pengelolaan keuangan, memiliki akal atau intelektual yang cerdas, semangat, kesungguhan kerja, dan pendirian yang teguh (istiqomah dan bertanggung jawab). Di bidang lain, kenyataannya adalah pengelola dana BOS (sumber daya manusia) masih terbatas dalam manajemen keuangan dan penggunaan teknologi informasi berbasis komputer. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa mereka biasanya adalah guru kelas di sekolah

tersebut, yang sudah melakukan tugas dan tanggung jawab pokok mereka sebagai pendidik. karena itu, laporan tanggung jawab pengelolaan dana BOS sering mengalami kesulitan.

1. Komunikasi

Faktor komunikasi termasuk transmisi (kebijakan tentang sekolah gratis ditransmisikan melalui dana BOS oleh Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah), kejelasan (tujuan sekolah gratis dijelaskan melalui dana BOS), dan konsekuensi dan kekonsistenan. Berdasarkan tersebut maka peneliti melakukan wawancara sebagai berikut:

“Ya, pelaksanaan program BOS disini sudah sesuai dengan petunjuk teknis BOS terbaru, yaitu tahun 2022. Dari mulai penetapan alokasi dana BOS hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran (wawancara dengan KE, 10 Juli 2023).

Selain itu disisi lain :

“Selama program BOS, dari awal hingga akhir, kita menyesuaikan dengan petunjuk teknis BOS terbaru tahun 2022. Jika petunjuk teknis ini tidak ada, kami akan menghadapi banyak masalah. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran BOS harus sesuai dengan petunjuk teknis terbaru BOS.(Wawancara dengan SK 10 Juli 2023)

Dari hasil wawancara di atas, peneliti telah menentukan bahwa pelaksanaan Program BOS telah sesuai dengan Petunjuk Teknis BOS. Oleh karena itu, Juknis BOS tahun 2022 berlaku untuk pelaksanaan program BOS.

Pihak sekolah pun memang selalu mengikuti bimtek sosialisasi pengelolaan Dana BOS itu sendiri sehingga pengelolaan yang dilakukan

oleh sekolah ketika mendapatkan Dana BOS sendiri benar-benar bias menunjang kegiatan di sekolah.

“Kami benar-benar mengikuti bintek sosialisasi pengelolaan BOS dari dinas terkait dan juga sebagai pihak sekolah mensosialisasikan penggunaan dana BOS kepada warga sekolah, yang diwakili oleh komite sekolah dan wali murid. Kami selalu menerima bimtek sosialisasi pengelolaan BOS dari dinas terkait dan mensosialisasikan kembali kepada warga sekolah setiap kali ada perubahan” (wawancara dengan KE, 10 Juli 2023)

Menurut analisis peneliti, dinas terkait selalu melakukan sosialisasi melalui Bimtek Pengelolaan BOS dan pihak sekolah SD INP Bambamanurung selalu mengikuti kegiatan untuk mengetahui setiap kali ada perubahan aturan dan juknis terkait dana BOS.



Gambar 4.1Bimtek Sosialisasi BOS Dinas Kabupaten ke Sekolah



Gambar 4.2 Bimtek Sosialisasi BOS ke Warga Sekolah

2. Sumber Daya

Faktor Sumber Daya terdiri dari Staff yaitu tersedianya pelaksana kebijakan sekolah gratis melalui dana BOS, tersedianya tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah yang menyelenggarakan sekolah gratis, *Size* (ukuran) yaitu Jumlah staf seimbang dengan pekerjaan mengelola dana BOS, *Skill* (keahlian) yaitu Pengelola bos memiliki skill sesuai dengan latar belakang pendidikannya, Budgetary/Financial (keuangan) Dana BOS,

Facility/Sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan dan Information and Authority (informasi dan Kewenangan).

Tabel 4.1 Daftar Tabel Pengelola dana BOS di SD INP Bambamanurung

NO	SDM	Jumlah
1	Pengawas BOS	0
2	Pengelola BOS	1
3	Bendahara BOS	1

Tabel 4.2 Daftar Tabel Sarana dan Prasarana SD INP Bambamanurung

NO	Sarana	Jumlah	Prasarana	Jumlah
1	Ruang kelas	6 bh	Lemari kantor	1 bh
2	Ruang UKS	0 bh	Lemari kelas	0 bh
3	Perpustakaan	1 bh	Bak sampah	6 bh
4	Kamar mandi/WC	4 bh	Rak buku	5 bh
5	Ruang Serbaguna	0 bh	Tiang bendera	1 bh
6	Musholla	0 bh	Gambar garuda	7 bh
7	Kantin	2 bh	Gambar presiden	7 bh
8	Ruang guru	0 bh	Gambar Gub/Bupati	1 bh

Untuk membantu sekolah mengelola Dana BOS, penting bagi petugas yang diberi SK oleh kepala sekolah yang bersangkutan. Ini dilakukan untuk mengurangi kesalahan dalam operasional atau pengelolaan Dana BOS sendiri. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan dari SD INP Bambamanurung, peneliti menunjukkan bahwa :

“Ya, saya mendapat SK dari Kepala Sekolah sebagai Bendahara BOS terhitung dari tahun pelajaran 2022 hingga 2023”. (Wawancara dengan MS 11 Juli 2023)

Pernyataan ini diperkuat oleh :

“Benar, Guru yang ditunjuk sebagai petugas atau bendahara BOS memiliki SK” (Wawancara dengan SK 11 Juli 2023)

Sebagai kesimpulan dari pernyataan informan peneliti, dapat disimpulkan bahwa setiap sekolah yang mendapatkan dana BOS telah memiliki staf yang diberikan SK sesuai dengan juknis yang ada.

“Ya, ada pengawasan yang mengawasi kami selaku pelaksana program BOS dilakukan baik dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Topoyo maupun dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah” (Wawancara dengan KE 11 Juli 2023)

Sedangkan dilain sisi :

Ada pengawas yang mengawasi pelaksanaan Program BOS yang dilakukan kepada sekolah kami oleh dinas terkait”. (Wawancara dengan MS 11 Juli 2023)

Tanggapan tersebut di perkuat oleh :

”Ya, masyarakat dan dinas terkait mengawasi pengelolaan dana BOS” (Wawancara dengan SK 11 Juli 2023)

Dari semua informan yang diwawancarai penulis mengambil kesimpulan pelaksanaan program BOS di SD INP Bambamanurung diawasi oleh pihak terkait.

“Dengan latar belakang akademik hanya sebagai pendidik, petugas dengan SK tambahan belum cukup mahir dalam manajemen keuangan. Kami berusaha membantu mereka dengan diklat administrasi dan keuangan yang disediakan oleh organisasi swasta dan pemerintah” (Wawancara dengan KE 11 Juli 2023)

Sedangkan disisi lain:

“Saya percaya bahwa sebagai bendahara BOS, saya memiliki kemampuan yang diperlukan. Namun, karena saya tidak memiliki pengalaman dalam administrasi dan keuangan, saya dapat mengelola BOS dengan baik. Dengan beberapa tahun sebagai bendahara BOS dan mengumpulkan informasi dari berbagai inisiatif, saya mampu mengelola BOS dengan baik. (Wawancara dengan MS 11 Juli 2023)

Peneliti menemukan bahwa karyawan yang memperoleh SK memiliki pengalaman dalam pengelolaan sekolah. Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa karyawan yang diberi tugas sebagai pengelola BOS adalah guru yang juga diberi tugas sebagai pengelola BOS. Akibatnya, mereka belum sepenuhnya memiliki pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola administrasi dan keuangan

Dari beberapa hasil analisa peneliti terhadap beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hal sumber daya yang terpengaruhi oleh kebijakan dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Petugas yang mengelola BOS sudah berdasarkan surat keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh sekolah ditandaangani oleh kepala sekolah;
- b. SD INP Bambamanurung sudah memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang memadai sesuai dengan jumlah siswa yang dimiliki;
- c. SK petugas pengelola BOS sudah berdasarkan struktur yang ada di Juknis BOS;
- d. Pelaksanaan program BOS sudah diawasi oleh para pengawas baik dari tingkat pusat, provinsi maupun oleh kabupaten/kota;

- e. SD INP Bambamanurung memiliki petugas yang memperoleh SK pengelola BOS tetapi tidak memiliki pengalaman dalam bidang pengelolaan administrasi dan keuangan sekolah, karena semua pengelola adalah guru yang diberi tugas tambahan dengan latar belakang akademik sebagai pendidik.
- f. Insentif sudah diberikan kepada semua pengelola BOS sesuai dengan Juknis BOS berupa transport dan uang lelah;
- g. Penyerahan dana BOS sudah sesuai dengan pedoman BOS terbaru, tetapi terkadang sering terjadi ketidak tepatan dalam jadwal pencairan dana BOS;
- h. Semua petugas pengelola BOS sudah mengetahui apa yang wewenang dan tanggung jawabnya dengan jelas.

3. Disposisi

Disposisi terdiri dari *Effect of Disposition* yaitu sejauh mana komitmen penanggung jawab sekolah gratis melalui dana BOS dan sitem mendukung pelaksanaan sekolahn gratis melalui dana BOS, *Staffing The Bureaucracy* yaitu Penempatan staff yang memiliki tanggung jawab terhadap kebijakan skolah gratis melalui dana BOS, *Incentives* yaitu adanya insentif yang mempengaruhi perilaku pengelola sekolah gratis melalui dana BOS

“Tentu saja, pemerintah selalu berkomitmen bahwa dana BOS untuk berbagai program sekolah gratis harus digunakan sesuai dengan pedoman BOS. Ini karena komitmen pemerintah ini telah diberikan kepada semua sekolah yang menerima dana BOS”(Wawancara dengan KE 13 Juli 2023)

Disatu sisi:

“Sekolah selalu berkomitmen bahwa dana BOS harus dan wajib disalurkan sesuai pedoman BOS tanpa adanya penyimpangan”
(Wawancara dengan SK 13 Juli 23)

Dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa komitmen sekolah untuk selalu menyalurkan dana BOS untuk pendidikan gratis sesuai dengan pedoman (BOS) dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa sekolah dalam menyalurkan dana BOS untuk sekolah gratis sudah sesuai dengan komitmen yang tertuang pada pedoman (BOS)

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi terdiri dari Fragmentation yaitu adanya pembagian wewenang pelaksana kebijakan sekolah gratis melalui dana BOS untuk tiap jenjang mulai dari pusat hingga daerah, Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yaitu adanya SOP dalam pelaksanaan kebijakan sekolah gratis melalui dana BOS di kantor dinas

“Kami telah mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai cara penyaluran dana BOS. Juknis BOS jelas tentang cara dana BOS didistribusikan ke sekolah gratis.”(Wawancara dengan KE 12 Juli 2023)

Hasil analisis peneliti menunjukkan bahwa ada prosedur yang digunakan untuk memberikan dana BOS kepada sekolah-sekolah yang gratis, sesuai dengan Juknis BOS.

“Tentu kami selalu membuat dokumen pelaporan karena Setiap sekolah dasar di wilayah Kecamatan Topoyo harus membuat laporan tentang penggunaan BOS dan dikirim ke dinas terkait sesuai dengan

petunjuk teknis Program BOS” (Wawancara dengan SK 12 Juli 2023)

Pernyataan ini diperkuat oleh :

“Ya, saya selaku bendahara BOS sekolah selalu membuat dokumen pelaporan penggunaan BOS ke dinas terkait (Wawancara dengan MS 12 Juli 2023)

Menurut beberapa pernyataan informan, analisis peneliti menunjukkan bahwa SD INP Bambamanurung memiliki dokumen pelaporan penggunaan BOS yang dikirim ke berbagai pihak terkait. Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi yang terpengaruhi oleh kebijakan didasarkan pada temuan wawancara yang telah dilakukan sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. SD INP Bambamanurung sudah memiliki penanggung jawab pelaksanaan kebijakan sekolah gratis melalui dana BOS
- b. SD INP Bambamanurung Sudah ada mekanisme penyaluran dana BOS untuk sekolah gratis sesuai dengan Juknis BOS
- c. SD INP Bambamanurung sudah memiliki pedoman dalam pelaksanaan program BOS sesuai dengan Juknis BOS
- d. SD INP Bambamanurung memiliki dokumen pelaporan penggunaan BOS ke berbagai pihak terkait

5. Manfaat BOS bagi Masyarakat

- a. Harapan Masyarakat tentang Program BOS
 1. Adanya Pungutan Yang Dibebankan Kepada Orang Tua/Wali Murid

Menurut Komite Sekolah SD INP Bambamanurung

“Sesuai dengan ketentuan, sebenarnya sekolah tidak diperbolehkan melakukan pungutan kepada orang tua/wali murid, tetapi jika terdapat kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh BOS boleh saja ada pungutan dengan syarat atas kesepakatan bersama”. (Wawancara dengan SK 11 Juli 2023)

Analisa peneliti bahwa masih adanya pungutan yang dibebankan kepada orang tua/wali murid dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa kadang kala ada pungutan tetapi jika ada kebutuhan di luar anggaran BOS dan tidak dapat dipenuhi dapat saja dengan kesepakatan bersama orang tua wali/murid.

b. Sarana dan Prasarana Yang Disediakan Oleh Sekolah Sudah Sesuai Harapan

Menurut Komite Sekolah, bahwa sarana dan prasarana yang disediakan oleh sekolah sudah sesuai harapan adalah :

“Dengan adanya program BOS karena sekolah kami memiliki jumlah siswa yang lumayan banyak sehingga sarana dan prasarana pendidikan cukup memadai dan sesuai harapan”. (Wawancara dengan SK 13 Juli 2023)

Analisa peneliti bahwa sarana dan prasarana yang disediakan oleh sekolah sudah sesuai harapan dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa sarana dan prasarana yang disediakan oleh sekolah sudah sesuai harapan dengan adanya Program BOS.

Perihal Sarana dan Prasarana Yang Disediakan Oleh Sekolah Sudah Sesuai Harapan, menurut guru yang mengajar yaitu :

“Adanya program BOS sudah sepenuhnya dapat meningkatkan sarana dan prasarana karena anggaran dana BOS yang diterima sekolah ini (Wawancara dengan EN 14 Juli 2023)

Analisa peneliti bahwa sarana dan prasarana yang disediakan oleh sekolah sudah sesuai harapan dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa sarana dan prasarana yang disediakan oleh sekolah belum sepenuhnya sesuai harapan.

Dari beberapa hasil analisa peneliti terhadap beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam manfaat BOS bagi masyarakat dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Harapan masyarakat tentang Program BOS yaitu tidak ada lagi pungutan yang dibebankan kepada orang tua/wali murid, kualitas pembelajaran/Hasil Pembelajaran terjadi peningkatan, sarana dan prasarana pendidikan dengan adanya Program BOS harus memadai.
- b. Manfaat yang dirasakan dengan adanya kebijakan sekolah gratis yaitu semua anak yang tinggal di sekitar sekolah terserap oleh sekolah, sekolah tidak membebani biaya kepada orang tua / wali murid, Dengan hasil pembelajaran berhasil dan memuaskan dan sarana dan prasarana yang disediakan oleh sekolah sudah sesuai harapan.

6. Permasalahan Implementasi Program BOS

a. Faktor Pendorong

1. Antusias Masyarakat Memilih Sekolah Gratis

Menurut Kepala Sekolah SD INP Bambamanurung, bahwa antusias masyarakat memilih sekolah gratis adalah

“Masyarakat sangat antusias dalam memilih sekolah gratis, harapan mereka walaupun sekolah gratis tetapi pembelajaran tetap harus berkualitas”. (Wawancara dengan KE 14 Juli 2023)

Analisa peneliti bahwa antusias masyarakat memilih sekolah gratis dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa masyarakat memiliki antusias yang tinggi memilih sekolah gratis.

Sedangkan menurut Bendahara Sekolah SD INP Bambamanurung yaitu :

“Dengan adanya sekolah gratis tentu saja masyarakat sangat berantusias untuk mengekolahkan anaknya dengan harapan hasilnya pun maksimal”. (Wawancara dengan Bendahara MS 14 Juli 2023)

Analisa peneliti bahwa antusias masyarakat memilih sekolah gratis dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa masyarakat memiliki antusias yang tinggi memilih sekolah gratis.

Sedangkan menurut Guru Sekolah SD INP Bambamanurung yaitu :

“Masyarakat sangat terbantu sekali dengan adanya sekolah gratis, masyarakat tinggal memikirkan transport dan peralatan sekolah”. (Wawancara dengan EN 14 Juli 2023)

Analisa peneliti bahwa antusias masyarakat memilih sekolah gratis dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa masyarakat memiliki antusias yang tinggi memilih sekolah gratis.

Sedangkan menurut Komite Sekolah SD INP Bambamanurung yaitu :

“Rata-rata masyarakat antusias menyambut adanya sekolah gratis dengan adanya bantuan BOS dari pemerintah”. (Wawancara dengan SK 14 Juli 2023)

2. Kondisi Angka Putus Sekolah Setelah Adanya Program BOS

Menurut Kepala Sekolah, bahwa kondisi angka putus sekolah setelah adanya program BOS adalah :

“Semua siswa di SD INP Bambamanurung tidak ada yang putus sekolah, dan rata-rata lulus melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya” (Wawancara dengan KE 14 Juli 2023)

Analisa peneliti bahwa kondisi angka putus sekolah setelah adanya program BOS dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa kondisi angka putus sekolah setelah adanya program BOS dapat ditekan.

Sedangkan menurut Bendahara Sekolah SD INP Bambamanurung yaitu :

“Selama ini angka putus sekolah dengan adanya Program BOS bisa ditekan, tiap tahun rata-rata siswa lulus dan meneruskan sekolah ke SMP” (Wawancara dengan MS 14 Juli 2023)

Analisa peneliti bahwa kondisi angka putus sekolah setelah adanya program BOS dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa kondisi angka putus sekolah setelah adanya program BOS dapat ditekan.

- b. Faktor Penghambat
 - 1. Waktu Pencairan Dana BOS

Menurut Kepala Sekolah SD INP Bambamanurung, bahwa waktu pencairan dana BOS adalah :

“Waktu pencairan dana BOS, selalu mengalami kelambatan tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan” (Wawancara dengan KE 15 Juli 2023)

Analisa peneliti tentang waktu pencairan dana BOS dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa pencairan dana BOS yang sering terjadi tidak tepat waktu tidak sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

Sedangkan menurut Bendahara Sekolah SD INP Bambamanurung yaitu :

“Selalu terjadi keterlambatan pencairan dana BOS sampai dengan dua bulan dari waktu yang sudah ditentukan” (Wawancara dengan MS 15 Juli 2023)

Analisa peneliti tentang waktu pencairan dana BOS dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa pencairan dana BOS yang sering terjadi tidak tepat waktu tidak sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

Sedangkan menurut Guru SD INP Bambamanurung yaitu :

“Pencairan dana BOS tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, sering terjadi keterlambatan” (Wawancara dengan EN 15 Juli 2023)

Analisa peneliti tentang waktu pencairan dana BOS dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa pencairan dana BOS yang sering terjadi tidak tepat waktu tidak sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

Sedangkan menurut Komite Sekolah SD INP Bambamanurung yaitu :

“Sering terjadi keterlambatan dalam pencairan dana BOS, sedangkan kebutuhan harus segera” (Wawancara dengan Komite Sekolah SDN 15 Juli 2023)

Analisa peneliti tentang waktu pencairan dana BOS dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa pencairan dana BOS yang sering terjadi tidak tepat waktu tidak sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

2. Penggunaan Dana BOS

Menurut Kepala Sekolah SD INP Bambamanurung, bahwa penggunaan Dana BOS adalah :

“Adakalanya penggunaan dana BOS tidak sesuai dengan juknis ada variabel biaya yang harus dibayar yang sudah ditentukan oleh dinas terkait” (Wawancara dengan KE SD INP Bambamanurung)

Analisa peneliti tentang penggunaan Dana BOS dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa penggunaan Dana BOS

sudah sesuai dengan Juknis dan rencana anggaran yang dibuat sekolah, tetapi sering terjadi adanya biaya tidak terduga.

Sedangkan menurut Bendahara Sekolah SD INP Bamabamurung yaitu :

“Selalu saja ada pembelian kebutuhan yang tidak sesuai dengan skala prioritas sekolah kami yang harus dibayar” (Wawancara dengan MS 15 Juli 2023)

Analisa peneliti tentang penggunaan Dana BOS dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa penggunaan Dana BOS sudah sesuai dengan Juknis dan rencana anggaran yang dibuat sekolah, tetapi sering terjadi adanya biaya tidak terduga.

Sedangkan menurut Guru SD INP Bambamanurung yaitu :

“Sering terjadi setiap pencairan dana BOS harus membayar biaya pembelian barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah kami” (Wawancara dengan EN 15 Juli 2023)

Analisa peneliti tentang penggunaan Dana BOS dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa penggunaan Dana BOS sudah sesuai dengan Juknis dan rencana anggaran yang dibuat sekolah, tetapi sering terjadi adanya biaya tidak terduga.

Sedangkan menurut Komite Sekolah SD INP Bambamanurung yaitu :

“Ada saja, tiap pencairan dana BOS penggunaannya tidak sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dan tidak sesuai skala prioritas” (Wawancara dengan SK 15 Juli 2023)

Analisa peneliti tentang penggunaan Dana BOS dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa penggunaan Dana BOS

sudah sesuai dengan Juknis dan rencana anggaran yang dibuat sekolah, tetapi sering terjadi adanya biaya tidak terduga.

C. Pembahasan

Untuk menjawab rumusan masalah yang penulis ajukan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SD INP Bambamanurung dilihat dari Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasinya. Yang mana hasil wawancara dengan informan yang terkait dengan implementasi Program BOS di SD yang melibatkan kepala sekolah, bendahara BOS, komite sekolah, bendahara BOS dan guru. Kebijakan publik yang sudah diimplementasikan dapat dinilai berhasil apabila tujuan dari kebijakan tersebut sudah tercapai dan tertuju pada titik sasaran yang sesuai dengan tujuan awalnya. Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah di SD INP Bambamanurung Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah bisa berjalan dengan cukup baik karena faktor-faktor keberhasilan implementasi saling berhubungan. Selain itu, karakteristik kelompok sasaran mempengaruhi seberapa lama implementasi dapat diterapkan dan apakah itu berhasil.

1. Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SD INP Bambamanurung Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan dalam menganalisis Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SD INP Bambamanurung Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah adalah

teori Edward III. Dari teori Edward III Dalam mengkaji kebijakan, Pemerintah membuat kebijakan BOS yang memungkinkan siswa pergi ke sekolah tanpa harus membayar apa pun untuk biaya investasi atau operasional sekolah. Teori Edward III yaitu Faktor Komunikasi; Faktor Sumber Daya, Faktor Kecenderungan (Disposisi) dan Struktur Birokrasi.

Faktor komunikasi termasuk transmisi (kebijakan tentang sekolah gratis ditransmisikan melalui dana BOS oleh Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah), kejelasan (tujuan sekolah gratis dijelaskan melalui dana BOS), dan konsekuensi dan konsistensi. *Faktor Sumber Daya* terdiri dari Staff yaitu tersedianya pelaksana kebijakan sekolah gratis melalui dana BOS, tersedianya tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah yang menyelenggarakan sekolah gratis, Size (ukuran) yaitu Jumlah staf seimbang dengan pekerjaan mengelola dana BOS, *Skill* (keahlian) yaitu Pengelola bos memiliki skill sesuai dengan latar belakang pendidikannya, *Budgetary/Financial* (keuangan) Dana BOS, *Facility/Sarana* prasarana penunjang kegiatan pendidikan dan *Information and Authority* (informasi dan Kewenangan). *Faktor Disposisi* terdiri dari *Effect of Disposition* yaitu sejauh mana komitmen penanggung jawab sekolah gratis melalui dana BOS dan sitem mendukung pelaksanaan sekolahn gratis melalui dana BOS, *Staffing The Bureaucracy* yaitu Penempatan staff yang memiliki tanggung jawab terhadap kebijakan skolah gratis melalui dana BOS, *Incentives* yaitu danya insentif yang mempengaruhi perilaku pengelola sekolah gratis melalui dana BOS.

Struktur Birokrasi terdiri dari Fragmentation yaitu adanya pembagian wewenang pelaksana kebijakan sekolah gratis melalui dana BOS untuk tiap jenjang mulai dari pusat hingga daerah, Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yaitu adanya SOP dalam pelaksanaan kebijakan sekolah gratis melalui dana BOS di kantor dinas. Dari teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III dapat menjelaskan mengenai Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah di SD INP Bambamanurung Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah sebagai berikut :

a. Komunikasi

Dalam hal komunikasi yang dipengaruhi oleh kebijakan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bisa dijelaskan jika pelaksanaan Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah di SD INP Bambamanurung Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah sudah mengikuti petunjuk teknis BOS dan berjalan dengan cukup baik, terdapat sosialisasi dari dinas terkait ke sekolah, serta adanya petunjuk Teknis BOS yang diberikan kepada sekolah, adanya sosialisasi Bintek pengelolaan BOS yang diikuti secara rutin, dan penggunaan dana yang sepenuhnya untuk kepentingan sekolah.

b. Sumber Daya

Dalam hal sumber daya yang dipengaruhi oleh kebijakan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bisa dijelaskan jika semua petugas yang bertugas mengelola BOS sudah berdasarkan surat keputusan (SK)

yang telah dikeluarkan oleh sekolah dan di tanda tangani langsung oleh Kepala Sekolah, kemudian SD INP Bamabamanurung sendiri telah memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang sudah memadai sesuai dengan jumlah siswa yang mereka miliki, semua SK petugas Pengelola BOS telah sesuai dengan standar struktur yang terdapat di Juknis BOS, pelaksanaa BOS di SD INP Bambamanurung Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah telah diawasi oleh para pengawas baik dari tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Tetapi petugas yang menerima SK Pengelola BOS adalah mereka yang tidak memiliki pengalaman dalam bidang pengelolaan administrasi keuangan, karena pengelola BOS adalah guru yang telah diberi tugas tambahan yang memiliki latar belakang pendidik.

c. Disposisi

Dalam hal disposisi yang dipengaruhi oleh kebijakan, hasil wawancara menunjukkan bahwa sekolah telah berkomitmen meyalurkan dana BOS untuk mendukung program sekolah gratis sesuai dengan pedoman. Pengelola BOS telah melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya, program BOS mendapat dukungan dari masyarakat, dan kegiatan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sekolah gratis dilakukan melalui dana BOS telah diikuti secara rutin.

d. Struktur Birokrasi

Dalam hal struktur birokrasi yang terpengaruhi oleh kebijakan dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat dijelaskan bahwa semua sekolah tiap jenjang sudah memiliki penanggung jawab pelaksanaan kebijakan sekolah gratis melalui dana BOS, sudah ada mekanisme penyaluran dana BOS untuk sekolah gratis sesuai dengan Juknis BOS, sudah ada pedoman dalam pelaksanaan program BOS sesuai dengan Juknis BOS dan semua sekolah memiliki dokumen pelaporan penggunaan BOS ke berbagai pihak baik triwulan maupun tahunan.

e. Manfaat Yang Dirasakan oleh Masyarakat dengan Adanya Program BOS

Dari beberapa hasil analisa peneliti terhadap beberapa pernyataan di atas dalam manfaat BOS bagi masyarakat dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Harapan masyarakat tentang Program BOS yaitu tidak ada lagi pungutan yang dibebankan kepada orang tua/wali murid, kualifikasi
- b. pembelajaran/Hasil Pembelajaran terjadi peningkatan, sarana dan prasarana pendidikan dengan adanya Program BOS harus memadai.
- c. Manfaat yang dirasakan dengan adanya kebijakan sekolah gratis yaitu semua anak yang tinggal di sekitar sekolah terserap oleh sekolah, sekolah tidak membebani biaya kepada orang tua / wali murid, Dengan hasil pembelajaran berhasil dan memuaskan dan sarana dan prasarana yang disediakan oleh sekolah sudah sesuai harapan.

f. Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Implementasi Program

Dari beberapa hasil analisa peneliti terhadap beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam permasalahan implementasi Program BOS yaitu faktor pendorong dan penghambat, dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

f. Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah di SD INP Bambamanurung Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah

- a. Faktor pendorong dalam Implementasi Program BOS yaitu semua masyarakat memiliki antusias yang tinggi dalam memilih sekolah gratis dan tidak akan kekurangan siswa, dengan adanya program BOS angka putus sekolah dan tinggal sekolah dapat ditekan.
- b. Faktor penghambat dalam Implementasi Program BOS yaitu waktu Pencairan dana BOS tidak tepat waktu, penggunaan Dana BOS terkadang tidak sesuai dengan rencana kegiatan dan skala prioritas kebutuhan sekolah karena adanya campur tangan birokrasi dalam pengelolaan dana BOS dengan adanya instrument biaya yang tidak terduga yang harus dibeli sekolah yang ditentukan oleh dinas terkait.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di pembahasan maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

- a. Dalam hal komunikasi yang dipengaruhi oleh kebijakan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bisa dijelaskan jika pelaksanaa Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah di SD INP Bambamanurung Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah sudah mengikuti petunjuk teknis BOS dan berjalan dengan cukup baik.
- b. Sumber Daya dalam hal ini adalah ketersediaan petugas yang mengelola BOS sesuai petunjuk Juknis
- c. Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan baik dan cukup konsisten dalam meyalurkan dana BOS sesuai yang tertulis di Juknis
- d. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi terdapat dalam mekanisme penyaluran dana BOS untuk sekolah gratis sesuai dengan Juknis BOS, sudah ada pedoman dalam pelaksanaan program BOS sesuai dengan Juknis BOS dan semua sekolah memiliki dokumen pelaporan penggunaan BOS ke berbagai pihak baik triwulan maupun tahunan.

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan dilapangan, maka penyimpulan akhir tentang Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SD INP Bambamanurung secara umum sudah

berjalan sesuai dengan petunjuk pelaksanaa dan petunjuk teknik Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Semua petugas pelaksana BOS sudah memiliki SK sesuai dengan peraturan yang ditanda tangani oleh kepala sekolah dan dana yang dialokasikanpun sudah sesuai dengan petunjuk aturan. Meski terkadang terhambat oleh pencairan dana BOS yang tidak tepat waktu, penggunaan Dana BOS terkadang tidak sesuai dengan rencana kegiatan dan skala prioritas kebutuhan sekolah dengan adanya instrument biaya yang tidak terduga yang harus dibeli sekolah yang ditentukan oleh dinas terkait.

B. Saran

Berdasarkan hasil Penelitian, untuk membantu program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), peneliti ingin memberikan rekomendasi berikut berdasarkan hasil penelitian mereka:

1. Kepala sekolah, bendahara BOS, dan guru diharapkan bekerja sama dengan baik dalam hal pelaporan penggunaan dana BOS sehingga dana dapat dicairkan dengan cepat
2. Dalam hal komunikasi diharapkan terjalinnya komunikasi yang baik antara Tim BOS dari Dinas Pendidikan dengan Tim BOS pihak sekolah supaya memudahkan pihak sekolah dalam penyusunan laporan dana BOS

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. ., & Warjio. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. *Administrasi Publik*, 6(2), 92–113.
- Annisa, N. (2020). *Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar (studi Kabupaten Kampar)*. UIN Suska Riau.
- Fauziah, W. E., & Arif, L. (2021). Model Implementasi Kebijakan Van Meter Van Horin Dalam Tinjauan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (Ring Road) Di Kabupaten Tuban. *Pembangunan*, 4 No 2, 677.
- Grindle, M. S. (1980). *Politic and Policy Implementation in The Third World*. Princeton University Press.
- Gunawan, I. G. H., & Sumada, I. M. (2021). Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar No 1 Blankiuh Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. *Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 18, 29.
- III, G. C. E. (1984). *Public Policy Implementation*. JAI Press.
- Kemendikbud. (2023). *Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*. [http://ditpsd.kemdikbud.go.id/hal/bos#:~:text=Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan,operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan](http://ditpsd.kemdikbud.go.id/hal/bos#:~:text=Dana%20Bantuan%20Operasional%20Satuan%20Pendidikan,operasional%20nonpersonalia%20bagi%20Satuan%20Pendidikan)
- Kemenkeu. (2022). *Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/pontianak/id/data-publikasi/berita-terbaru/2927-dana-bantuan-operasional-sekolah-bos.html>
- Madani, M. (2011). *Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. Graha Ilmu.
- Mamonto, N., Sumampouw, I., & Undap, G. (2018). Implementasi Pembangunan Insrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 3.
- Nur, A. C., & Guntur, M. (2019). *Analisis Kebijakan Publik*. Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Permendikbud. (2012). *Permendikbud No 76 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Aanggran 2013*.
- Prakoso, L. Y. (2019). *Perumusan Kebijakan Publik (Public Policy Formulation)*.

- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11, 2.
- Rosmawaty, L. F. (2021). *Implementasi Kebijakan Reguler BOS Reguler SMP Negeri di Kabupaten Sumedang*. STIA Sebelas APRIL Sumedang.
- Saefullah, D. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik* (1st ed.). AIPI Bandung.
- Sendjaja, S. D. (2019). *Memahami Teori Komunikasi: Pendekatan, Pengertian, Kerangka Analis, dan Perspektif*.
- Subarsono, A. (2011). *Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Syahrudin. (2019). *Implementasi Kebijakan Publik* (2nd ed.). Nusa Media.
- Syaukani, dkk. (2006). *Otonomi Daerah dalam Negara kesatuan* (III). Pustaka Pelajar.
- Tjilen, A. P. (2019). *Konsep, Teori, dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik*. Penerbit Nusa Media.
- Wahyudi, A. (2016). Implementasi rencana strategis badan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin. *Ilmiah Administrasi Negara*, 2(2), 101–105.
- Widodo, A. P., Purnamasari, A. I., Wardani, Y. I., Aulia, D. H., & Hasannah, Z. N. (2020). Implementasi Kebijakan Dana BOS di Kota Malang. *Ilmu Sosial*, 17.
- Widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Bayumedia.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Center for Academic Publishing Service.
- Afandi, M. ., & Warjio. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. *Administrasi Publik*, 6(2), 92–113.
- Annisa, N. (2020). *Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar (studi Kabupaten Kampar)*. UIN Suska Riau.
- Fauziah, W. E., & Arif, L. (2021). Model Implementasi Kebijakan Van Meter Van Horin Dalam Tinjauan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (Ring Road) Di Kabupaten Tuban. *Pembangunan*, 4 No 2, 677.
- Grindle, M. S. (1980). *Politic and Policy Implementation in The Third World*. Princeton University Press.

- Gunawan, I. G. H., & Sumada, I. M. (2021). Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar No 1 Blankiuh Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. *Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 18, 29.
- III, G. C. E. (1984). *Public Policy Implementation*. JAI Press.
- Kemendikbud. (2023). *Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*. <http://ditpsd.kemdikbud.go.id/hal/bos#:~:text=Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan,operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan>
- Kemenkeu. (2022). *Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/pontianak/id/data-publikasi/berita-terbaru/2927-dana-bantuan-operasional-sekolah-bos.html>
- Madani, M. (2011). *Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. Graha Ilmu.
- Mamonto, N., Sumampouw, I., & Undap, G. (2018). Implementasi Pembangunan Insrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 3.
- Nur, A. C., & Guntur, M. (2019). *Analisis Kebijakan Publik*. Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Permendikbud. (2012). *Permendikbud No 76 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Aanggran 2013*.
- Prakoso, L. Y. (2019). *Perumusan Kebijakan Publik (Public Policy Formulation)*.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11, 2.
- Rosmawaty, L. F. (2021). *Implementasi Kebijakan Reguler BOS Reguler SMP Negeri di Kabupaten Sumedang*. STIA Sebelas APRIL Sumedang.
- Saefullah, D. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik* (1st ed.). AIPI Bandung.
- Sendjaja, S. D. (2019). *Memahami Teori Komunikasi: Pendekatan, Pengertian, Kerangka Analisis, dan Perspektif*.
- Subarsono, A. (2011). *Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Syahrudin. (2019). *Implementasi Kebijakan Publik* (2nd ed.). Nusa Media.
- Syaukani, dkk. (2006). *Otonomi Daerah dalam Negara kesatuan (III)*. Pustaka Pelajar.
- Tjilen, A. P. (2019). *Konsep, Teori, dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan*

Publik. Penerbit Nusa Media.

Wahyudi, A. (2016). Implementasi rencana strategis badan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin. *Ilmiah Administrasi Negara*, 2(2), 101–105.

Widodo, A. P., Purnamasari, A. I., Wardani, Y. I., Aulia, D. H., & Hasannah, Z. N. (2020). Implementasi Kebijakan Dana BOS di Kota Malang. *Ilmu Sosial*, 17.

Widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Bayumedia.

Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Center for Academic Publishing Service.



LAMPIRAN



(Gambar Wawancara dengan Komite Sekolah SD INP Bambamanung)



(Wawancara dengan Kepala Sekolah SD INP Bambamanung)



(Gambar Wawancara dengan Bendahara Sekolah SD INP Bambamanurung)



(Gambar Wawancara dengan Guru Sekolah SD INP Bambamanurung)

BUKU KAS UMUM

Nama Sekolah : UPTD SD INPRES BAMBAMANURUNG

Desa/Kecamatan : Topoyo

Kabupaten/Kota : Mamuju Tengah

Provinsi : Sulawesi Barat

TERMIN II

NO	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	02-05-2022		Lang Masuk Di Rekening	40,608,000		40,608,000
1	01 Mei 2022	421.2.2/01/BOS-KW/V/2022	Dibayar Biaya Transportasi Pencatatan Dana BOS Periode Mei - September 2022 di Bank Sulselbar Cabang Topoyo		300,000.00	40,308,000
2	2 Mei 2022	421.2.2/02/BOS-KW/V/2022	Di bayar biaya penggantian Paspasap-Asesmen		621,000.00	39,687,000
3	3 Mei 2022	421.2.2/03/BOS-KW/V/2022	Dibayar Biaya Honorarium pembina prima/ka Mei-September 2022		1,100,000.00	38,587,000
4	4 Mei 2022	421.2.2/04/BOS-KW/V/2022	Dibayar Belanja Makan Minum KKKS/UKIP Mei -September 2022		250,000.00	38,337,000
5	5 Mei 2022	421.3.05/BOS-KW/V/2022	Dibayar Biaya Makan Minum KKKS/UKKS Mei-September 2022		175,000.00	38,162,000
6	6 Mei 2022	421.4.0/06/BOS-KW/V/2022	Dibayar Biaya Transportasi Peserta KKG		250,000.00	37,912,000
7	7 Mei 2022	421.5.07/BOS-KW/V/2022	Dibayar Biaya Transportasi KKKS Mei - September 2022		175,000.00	37,737,000
8	8 Mei 2022	421.6.0/08/BOS-KW/V/2022	Dibayar biaya pembelian papan tulis sekolah		2,200,000.00	35,537,000
9	9 Mei 2022	421.7.0/09/BOS-KW/V/2022	Di bayar biaya pembelian bangku sekolah		5,100,000.00	30,437,000
10	10 Mei 2022	421.8.1/10/BOS-KW/V/2022	Di bayar pembelian semen		600,000.00	29,837,000
11	11 Mei 2022	421.9.1/11/BOS-KW/V/2022	Dibayar Biaya lembur operator sekolah Mei -September 2022		1,250,000.00	28,587,000
12	12 Mei 2022	421.10.1/12/BOS-KW/V/2022	Dibayar belanja pulsa internet ops 2022		500,000.00	28,087,000
13	13 Mei 2022	421.2.1/13/BOS-KW/V/2022	Dibayar Biaya UKS, Perawatan dan atau Obat-obatan		1,807,000.00	26,280,000
14	14 Mei 2022	421.2.1/14/BOS-KW/V/2022	Dibayar Biaya belanja matrial Mei - September 2022		300,000.00	25,980,000
15	15 Mei 2022	421.2.1/15/BOS-KW/V/2022	Dibayar Biaya alk penyusunan laporan arfas Mei - September 2022		208,000.00	25,772,000
16	16 Mei 2022	421.2.1/16/BOS-KW/V/2022	di bayar biaya lembur pelaporan Arfas Mei - September 2022		1,800,000.00	23,972,000
17	17 Mei 2022	421.2.1/17/BOS-KW/V/2022	Dibayar Biaya pembelian pasir		350,000.00	23,622,000
18	18 Mei 2022	421.2.1/18/BOS-KW/V/2022	di bayar biaya Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan dana Bos Mei-September 2022		500,000.00	23,122,000
19	19 Mei 2022	421.2.1/19/BOS-KW/V/2022	Dibayar Biaya pengadaan alat kebersihan		1,505,000.00	21,617,000
20	20 Mei 2022	421.2.2/20/BOS-KW/V/2022	Dibayar Biaya langganan listrik sekolah		200,000.00	21,417,000
21	21 Mei 2022	421.2.2/21/BOS-KW/V/2022	Dibayar pembayaran honor guru		3,200,000.00	18,217,000

(Gambar Alokasi Dana BOS (Buku KAS Umum) SD INP Bambamanurung 2022)

22	22 Mei 2022	421.2/22/BOS-KW/V/2022	Dibayar Biaya pembelian cet Waterproof	430.000	17.787.000
23	23 Mei 2022	421.2/23/BOS-KW/V/2022	Dibayar Biaya upah tukang	750.000	17.037.000
24	24 Mei 2022	421.2/24/BOS-KW/V/2022	Dibayar Biaya pembelian Ak PPDB	55.000	16.982.000
25	25 Mei 2022	421.2/25/BOS-KW/V/2022	Dibayar Biaya makan pelaksanaan lomba MIPA	1.000.000	15.982.000
26	26 Mei 2022	421.2/26/BOS-KW/V/2022	Dibayar biaya Transportasi lomba MIPA	2.000.000	13.982.000
27	27 Mei 2022	421.2/27/BOS-KW/V/2022	Dibayar biaya Whorshop E-Rapor	1.380.000	12.602.000
28	28 Mei 2022	421.2/28/BOS-KW/V/2022	Dibayar biaya penggantian penilaian ulangan harian	315.300	12.286.700
29	09 Juni 2022	421.2/29/BOS-KW/VI/2022	Dibayar biaya penggantian penilaian ulangan akhir semester	111.000	12.175.700
30	10 Juni 2022	421.2/29/BOS-KW/VI/2022	Dibayar biaya penggantian penilaian ulangan kenaikan kelas	852.300	11.323.400
31	11 Juni 2022	421.2/30/BOS-KW/VI/2022	Dibayar biaya makan Rapat persiapan ANBK	250.000	11.073.400
32	12 Juni 2022	421.2/31/BOS-KW/VI/2022	Dibayar biaya Snack Rapat persiapan ANBK	150.000	10.923.400
33	13 Juni 2022	421.2/32/BOS-KW/VI/2022	Dibayar kegiatan kepramukaan	4.574.000	6.349.400
34	14 Juni 2022	421.2/33/BOS-KW/VI/2022	Dibayar biaya makan minum Kegiatan Revisi kunkulum	325.000	6.024.400
35	15 Juni 2022	421.2/34/BOS-KW/VI/2022	Dibayar biaya makan minum Kegiatan Revisi kunkulum	325.000	5.699.400
36	16 Juni 2022	421.2/35/BOS-KW/VI/2022	Dibayar biaya pembelian ATK Kantor	3.299.400	2.400.000
37	17 Juni 2022	421.2/36/BOS-KW/VI/2022	Dibayar Biaya snack KKG/MPG Mei-September 2022	150.000	2.250.000
38	18 Juni 2022	421.2/37/BOS-KW/VI/2022	Dibayar Biaya snack KKS/MKKKS Mei-September 2022	105.000	2.145.000
39	19 Juni 2022	421.2/37/BOS-KW/VI/2022	Dibayar biaya foto copy Foto dan kuarte PPDB	40.000	2.105.000
40	20 Juni 2022	421.2/38/BOS-KW/VI/2022	Dibayar biaya cetak spanduk PPDB	330.000	1.775.000
41	21 Juni 2022	421.2/39/BOS-KW/VI/2022	Dibayar biaya makan minum Panitia PPDB	325.000	1.450.000
42	22 Juni 2022	421.2/39/BOS-KW/VI/2022	Dibayar biaya Snack Panitia PPDB	130.000	1.320.000
43	23 Juni 2022	421.2/40/BOS-KW/VI/2022	Dibayar biaya lembar panitia PPDB	720.000	600.000
44	24 Juni 2022	421.2/41/BOS-KW/VI/2022	Dibayar Biaya snack lomba MIPA	600.000	-
Jumlah				40.608.000	

Kepala Sekolah

Bambamanurung

2022

Bendahara

KOMARI EDY SISWANTO.S.PdJ
NIP. 196901061995041001PELIPUS BIRA.S.Ag
NIP. 19720312201411002

(Gambar Alokasi Dana BOS (Buku KAS Umum) SD INP Bambamanurung 2022)

BUKU KAS UMUM

Nama Sekolah : UPTD SD INPRES BAMBAMANURUNG
 Desa/Kecamatan : Topoyo
 Kabupaten/Kota : Mamuju Tengah
 Provinsi : Sulawesi Barat

TERMIN III

NO	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (kredit)	Saldo
1	01-11-2022	3	4	5	6	7
			Uang Masuk Di Rekening	30,456,000		30,456,000
1	01 Sep 2022	421.2.01/BOS-KW/IX/2022	Dibayar biaya transportasi penumpang bus-rencana wler-September 2022		300,000.00	30,156,000
2	02 Sep 2022	421.2.02/BOS-KW/IX/2022	Dibayar biaya pengadaan langganan koran-Januari - Desember 2022		1,500,000.00	28,656,000
3	03 Sep 2022	421.2.03/BOS-KW/IX/2022	Dibayar Biaya Honorium pembina Pramuka September -Desember 2022		1,100,000.00	27,556,000
4	04 Sep 2022	421.2.04/BOS-KW/IX/2022	Dibayar Belanja Makan Minum KKG/MGMP / KKS/MKKKS September - Desember 2022		680,000.00	26,876,000
5	05 Sep 2022	421.2.05/BOS-KW/IX/2022	Dibayar Biaya Transportasi Peserta KKS September -Desember 2022		175,000.00	26,701,000
6	08 Sep 2022	421.2.06/BOS-KW/IX/2022	Dibayar biaya pembelian Bola Kaki		950,000.00	25,751,000
7	09 Sep 2022	421.2.07/BOS-KW/IX/2022	Dibayar biaya pengadaan komputer Hardisk		474,000.00	25,277,000
8	10 Sep 2022	421.2.08/BOS-KW/IX/2022	Dibayar Transportasi Pendamping Simulasi Asesmen 2022		105,000.00	25,172,000
9	11 Sep 2022	421.2.09/BOS-KW/IX/2022	Dibayar Biaya lembur pelaporan dana Bos September - Desember 2022		1,800,000.00	23,372,000
10	12 Sep 2022	421.2.10/BOS-KW/IX/2022	Dibayar Insentif proktor pelaksana Asesmen sekolah 2022		450,000.00	22,922,000
11	13 Sep 2022	421.2.11/BOS-KW/IX/2022	Dibayar Biaya UKS, Perawatan dan alat Obat obatan		9,000.00	22,913,000
12	14 Sep 2022	421.2.12/BOS-KW/IX/2022	Dibayar Biaya ak penyusunan laporan arkes September - Desember 2022		200,000.00	22,713,000
13	15 Sep 2022	421.2.13/BOS-KW/IX/2022	di bayar biaya lembur pelaporan Arkas September - Desember 2022		1,800,000.00	20,913,000
14	16 Sep 2022	421.2.14/BOS-KW/IX/2022	di bayar biaya Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan dana Bos September - Desember 2022		400,000.00	20,513,000
15	17 Sep 2022	421.2.15/BOS-KW/IX/2022	Dibayar Biaya pengadaan alat kebersihan september -desember 2022		1,635,000.00	18,878,000
16	18 Sep 2022	421.2.16/BOS-KW/IX/2022	Dibayar Biaya langganan listrik sekolah		403,000.00	18,475,000
17	19 Sep 2022	421.2.17/BOS-KW/IX/2022	Dibayar pembayaran honor guru		3,200,000	15,275,000
18	20 Sep 2022	421.2.18/BOS-KW/IX/2022	Dibayar Biaya langganan Internet Indihome		5,624,400	9,650,600
19	21 Sep 2022	421.2.19/BOS-KW/IX/2022	Dibayar Biaya Makan Minum Whorshoep penggalan dana bersama Komite sekolah		640,000	9,010,600
20	22 Sep 2022	421.2.20/BOS-KW/IX/2022	Dibayar Biaya makan minum penyusunan soal semester ganjil September -Desember 2022		2,000,000	7,010,600
21	23 Sep 2022	421.2.21/BOS-KW/IX/2022	Dibayar Insentif pelaksanaan Administrasi kegiatan sekolah		450,000	6,560,600

(Gambar Alokasi Dana BOS (Buku KAS Umum) SD INP Bambamanurung 2022)

22	24 Sep 2022	421.2/22/BOS-KW/IX/2022	Dibayar biaya penggantian penilaian ulangan harian September - Desember 2022		345,000	6,215,600
23	25 Sep 2022	421.2/23/BOS-KW/IX/2022	Dibayar biaya penggantian penilaian ulangan akhir semester		372,000	5,843,600
24	26 Sep 2022	421.2/24/BOS-KW/IX/2022	Dibayar biaya penggantian penilaian ulangan Tengah Semester 2022		547,500	5,296,100
25	2 Nov 2022	421.2/25/BOS-KW/VI/2022	Dibayar biaya pengadaan ATK Kantor		3,331,100	1,965,000
26	3 Nov 2022	421.2/26/BOS-KW/VI/2022	Dibayar insentif Pelatihan Pembuatan Kisi-Kisi Soal		670,000	1,295,000
27	12 Nov 2022	421.2/27/BOS-KW/VI/2022	Dibayar biaya makan minum Simulasi Pelaksanaan Asesmen Nasional 2022		445,000	850,000
28	13 Nov 2022	421.2/28/BOS-KW/VI/2023	Dibayar transportasi peserta KKG		250,000	600,000
29	14 Nov 2022	421.2/29/BOS-KW/VI/2024	Dibayar insentif pengawas ruang		600,000	-
Jumlah					30,456,000	(30,456,000)

Bambamanurung2022

Bendahara

Kepala Sekolah

KOMARI EDY SISWANTOS, Pd.I

NIP. 196901061995041001

PELIPUS BIRA, S.Ag

NIP.19720312201411002

(Gambar Alokasi Dana BOS (Buku KAS Umum) SD INP Bambamanurung 2022)

 **PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. Jend. Sudirman Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah 91565
Email : dpmptsp.mateng@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 007/ **83** /DPMPSTP/VI/2023

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
2. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tengah.
3. Surat dari Dekan Fakultas Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0859/FSP/A.1-VIII/VI/1444 H/2023 Tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

a) Nama : **SUKMA RAHMAWATY**
b) NIM : 105611100319
c) Program Studi : Ilmu administrasi Negara
d) Alamat : Jl.Poros Mamuju Palu Desa Bambamanurung Kec.Topoyo Kab.Mamuju Tengah
e) No. HP : 082195459500
f) Untuk : 1. Melakukan Penelitian/Pengumpulan Data dengan Judul "**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI SDN INPRESS BAMBAMANURUNG KECAMATAN TOPOYO KABUPATEN MAMUJU TENGAH**".
2. Lokasi Penelitian Di SDN INPRESS BAMBAMANURUNG KEC.TOPOYO MAMUJU TENGAH
3. Waktu/Lama Penelitian : Mulai Bulan 20 Juni s/d 20 Agustus 2023

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya Kami menyetujui Kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharpkan melapor kepada Bupati Mamuju Tengah, Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Mamuju Tengah.
2. Penelitian tidak Menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) Exemplar copy hasil penelitian Kepada Bupati Mamuju Tengah Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Mamuju Tengah.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Topoyo
Pada Tanggal: 21 Juni 2023
A/n Kepala Dinas
Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ABD RAHIM, S.Pd., M.Pd.
NIP. 197110051998021004



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Mamuju Tengah (Sebagai Laporan) di Tobadak ;
2. Fakultas Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Tobadak;
4. *Pertinjeal*

(Gambar Surat Keterangan Penelitian)


PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPTD SD INPRES BAMBAMANURUNG
Jln. Poros Mamuju Palu, Desa Bambamanurung, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah


SURAT KETERANGAN
 Nomor.421.2/79/Kep/Bbm-013/VII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : KOMARI EDY SISWANTO, S.Pd.I
 Nip : 19640106199504 1 010
 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I/IVb
 Jabatan : Kepala Sekolah
 Nama Sekolah : UPTD SD INPRES BAMBAMANURUNG
 Alamat : Jln. Poros Mamuju Palu, Desa Bambamanurung, Kecamatan Topoyo.

Menerangkan bahwa sesungguhnya saudara:

Nama : SUKMA RAHMAWATY
 NIM : 105611100319
 Universitas : Universitas Muhamaddiyah Makassar (UNISMUH)
 Prodi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Jurusan : Administrasi Negara

Telah di terima meneliti di Sd Inpres Bambamanurung Mulai Tanggal 20 Juni s/d 20 Agustus 2023.
 Dengan Judul Penelitian : **“Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) di Uptd Sd Inpres Bambamanurung”**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bambamanurung, 21 Juni 2023
 Kepala Sekolah

KOMARI EDY SISWANTO, S.Pd.I
 Pangkat/Gol: Pembina Tingkat I/IVb
 Nip: 196401061995041001



(Gambar Surat Izin Meneliti dari SD INP Bambamanurung)



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Sukma Rahmawaty
Nim : 105611100319
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	7 %	10 %
2	Bab 2	11 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	7 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5%

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 11 Agustus 2023
Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nuzsiana Nurul M.L.P.
NBM 965591

Sukma Rahmawaty 105611100319 Bab I

ORIGINALITY REPORT

7% SIMILARITY INDEX	7% INTERNET SOURCES	2% PUBLICATIONS	0% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

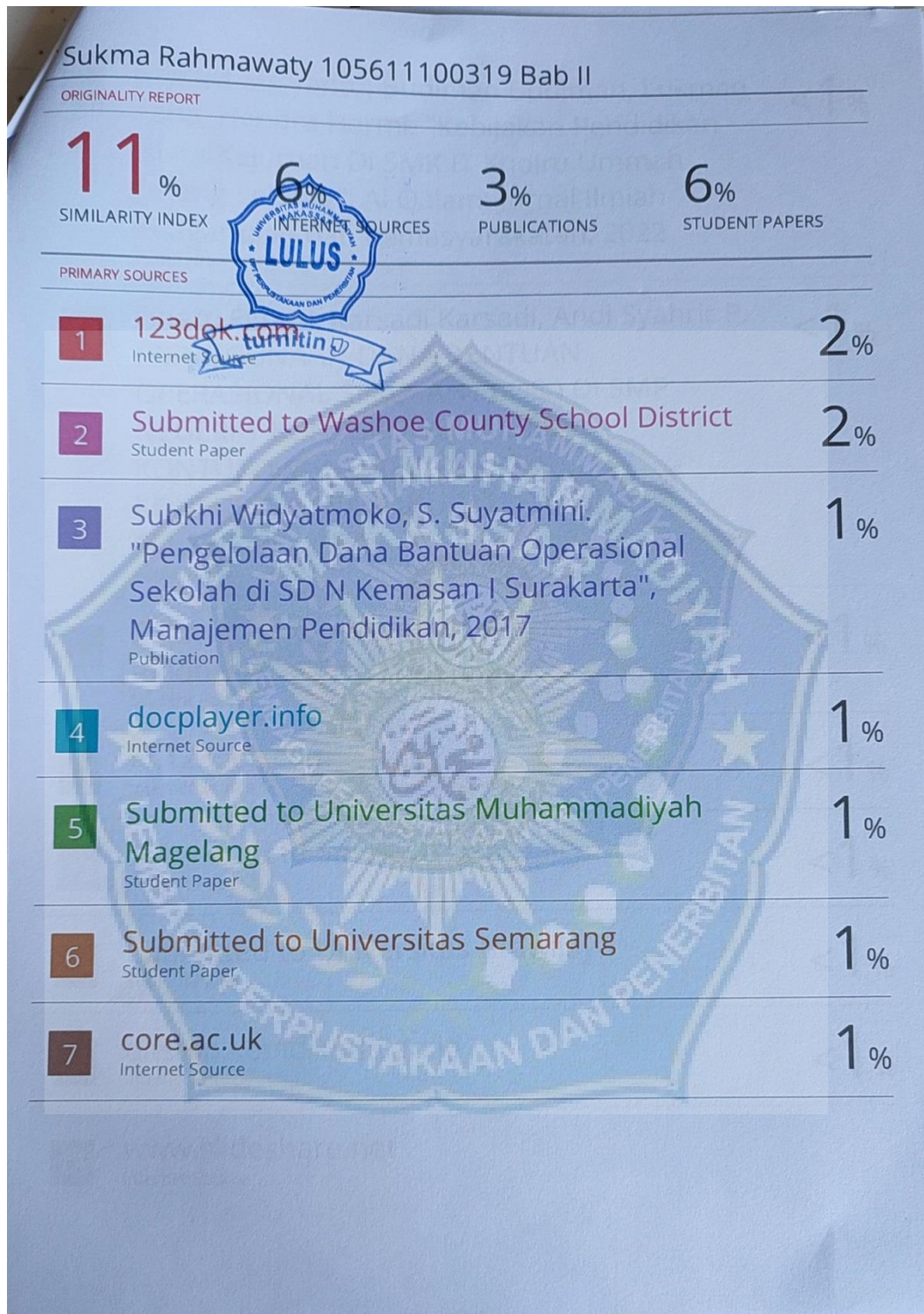
1	repository.uin-suska.ac.id	7%
	Internet Site	

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On






- 8 Babara Susyanto, Budiman Budiman, Lukman Asha, Hendra Harmi. "Kebijakan Pendidikan Islam Kejuruan Di SMK IT Khoiru Ummah Rejang Lebong", Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 2022
Publication <1 %
- 9 Finarti Finarti, Karsadi Karsadi, Andi Syahrir P. "PENGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI SMP NEGERI 1 KONTUKOWUNA DESA KONTUKOWUNA KECAMATAN KONTUKOWUNA KABUPATEN MUNA", SELAMI IPS, 2020
Publication <1 %
- 10 Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia
Student Paper <1 %
- 11 id.123dok.com
Internet Source <1 %
- 12 Submitted to Sriwijaya University
Student Paper <1 %
- 13 Submitted to Universitas Brawijaya
Student Paper <1 %
- 14 ditsmp.kemdikbud.go.id
Internet Source <1 %
- 15 www.slideshare.net
Internet Source <1 %

		<1%
16	pintek.id Internet Source	<1%
17	mafiadoc.com Internet Source	<1%
18	archive.org Internet Source	<1%

Exclude quotes On Exclude matches Off
Exclude bibliography On



Sukma Rahmawaty 105611100319 Bab III

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX



5%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	5%
2	www.slideshare.net Internet Source	2%
3	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

Sukma Rahmawaty 105611100319 Bab IV

ORIGINALITY REPORT

7% SIMILARITY INDEX **7%** INTERNET SOURCES **0%** PUBLICATIONS **0%** STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCE

1 repository.ub.ac.id Internet Source **7%**

Exclude quotes On Exclude matches < 2%
Exclude bibliography On



RIWAYAT HIDUP



SUKMA RAHMAWATY, dilahirkan di Mamuju 16 Nopember 2000 merupakan anak pertama dari dua bersaudara, memiliki saudara bernama Muh. Nur Azis Jamsar serta merupakan anak dari Pasangan Zain Sumardi S.Pd dan Nur Asiyah. Penulis beragama islam dan memiliki domisili di jln. Poros Mamuju Palu, Desa Bambamanurung, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah. Jenjang Pendidikan penulis yaitu menyelesaikan Pendidikan di SD INP Salupangkang pada tahun 2013, MTS YPUI Al-Ikhwan Topoyo pada tahun 2016, MA YPUI Al-Ikhwan Topoyo pada tahun 2019 dan melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi yaitu di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Penulis sangat bersyukur diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk memperkaya ilmu. Penulis berharap mampu mengamalkan ilmu terkhusus bidang Ilmu Administrasi Negara yang telah diperoleh, membahagiakan orang tua dan keluarga serta berusaha menjadi manusia yang berguna bagi agama, keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara.

